



**Politeknik Negeri
Balikpapan**

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024

REVISI III



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Revisi Renstra Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2020-2024. Renstra Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen resmi dalam menetapkan dan mengarahkan perkembangan Politeknik Negeri Balikpapan selama periode 2020-2024, serta merupakan pelaksanaan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekba 2015-2034. Adapun penyusunan revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Balikpapan ini bertujuan sebagai langkah penyesuaian dengan perkembangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perubahan dalam Revisi Rencana Strategis ini merupakan bentuk penerapan peraturan baru yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Politeknik Negeri Balikpapan.

Renstra Politeknik Negeri Balikpapan ini menggambarkan visi operasional kepemimpinan Poltekba untuk periode 2020-2024. Oleh karena itu, seluruh unit di Poltekba dapat menggunakan Renstra ini sebagai pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, hingga penyusunan anggaran.

Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi tim penyusun Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2020-2024, seluruh sivitas akademika, dan semua karyawan Politeknik Negeri Balikpapan dalam mensukseskan penyusunan rencana strategis ini. Beberapa kekurangan yang ada dalam dokumen ini hendaknya dijadikan sebagai dasar perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Balikpapan. Kami berharap Revisi Renstra Poltekba Tahun 2020-2024 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan menyatukan pandangan seluruh sivitas akademika Poltekba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan Poltekba yang lebih baik.

Balikpapan, 28 Juli 2024
Direktur,



Emil Azmanajaya
Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T.
NIP 197702242012121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Landasan Hukum	18
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	19
D. Kondisi Internal	19
E. Potensi dan Permasalahan	28
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	34
A. Visi	34
B. Misi	35
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	36
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	40
A. Arah Kebijakan dan Strategi	40
B. Kerangka Regulasi	48
C. Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
A. Target Kinerja	73
B. Kerangka Pendanaan	102
BAB V PENUTUP	105
A. Pedoman Pelaksanaan	105
B. Kaidah Pelaksanaan	105
LAMPIRAN	107
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	107
2. Kerangka Regulasi	113
3. IKU Politeknik Negeri Balikpapan mengacu pada Kepmendikbudristek 210/M/2023	114

DAFTAR TABEL

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	36
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	37
Tabel Sasaran dan Kinerja Sasaran/Utama	40
Tabel Sasaran IKU 1.1	41
Tabel Sasaran IKU 1.2	42
Tabel Sasaran IKU 2.1	43
Tabel Sasaran IKU 2.2	44
Tabel Sasaran IKU 2.3	44
Tabel Sasaran IKU 3.1	45
Tabel Sasaran IKU 3.2	45
Tabel Sasaran IKU 3.3	46
Tabel Sasaran IKU 4.1	46
Tabel Sasaran IKU 4.2	47
Tabel Sasaran IKU 4.3	47
Tabel Tabel Target Kinerja 2020-2022 (Kepmendikbud 754/P/2020)	74
Tabel Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021)	78
Tabel Tabel Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)	80
Tabel Sinkronisasi Target Program Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021	83
Tabel Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023	88
Tabel Tabel Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021	93
Tabel Tabel Sinkronisasi Indikator Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023	97
Tabel Tabel Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan Poltekba Tahun 2020-2024	103
Tabel Kerangka Pendanaan 2020-2023	103
Tabel Kerangka Pendanaan 2024	104

DAFTAR GAMBAR

Grafik Jumlah Ketersediaan Buku Ajar (sesuai Kurikulum 2014)	2
Grafik Jumlah Sesi Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Industri	3
Grafik Jumlah Proposal PKM yang Diajukan ke Dikti	4
Grafik Jumlah Perusahaan yang melakukan Rekrutmen di Kampus	4
Grafik Lulusan yang Bekerja Kurang dari 6 Bulan	5
Grafik Jumlah Perusahaan yang Menerima Lulusan	6
Grafik Luas Perpustakaan (m ²)	6
Grafik Jumlah Judul Literatur	7
Grafik Jumlah Judul Buku Ajar	8
Grafik Jumlah Jurnal Ilmiah yang Dilanggan	8
Grafik Jumlah E-Book	9
Grafik Jumlah E-Jurnal	9
Grafik Jumlah Leb/Bengkel/Tempat Praktek Lainnya	10
Grafik Jumlah Ruang Lab	10
Grafik Prosentase Ketersediaan Alat Mata Kuliah Praktek	11
Grafik Prosentase Ketersediaan Bahan Praktek	11
Grafik Jumlah Ruang Kuliah	12
Grafik Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa	12
Grafik Jumlah Lulusan Tersertifikasi Kompetensi Level Nasional	14
Grafik Jumlah Lulusan Tersertifikasi Kompetensi Level Internasional	14
Grafik Kemampuan Bahasa Inggris	15
Grafik Kelompok Mahasiswa Lolos Seleksi PKM	15
Struktur Organisasi Politeknik Negeri Balikpapan	50

DAFTAR ISTILAH

DIKTI	: Pendidikan Tinggi
IKU	: Indikator Kinerja Utama
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK	: Nomor Induk Dosen Khusus
PDDIKTI	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
POLTEKBA	: Politeknik Negeri Balikpapan
PRODI	: Program Studi
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKAK/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATKER	: Satuan Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIA	: Sistem Informasi Akademik
SIDAKIN	: Sistem Informasi Data dan Kinerja
SIKERMA	: Sistem Informasi Kerjasama
SISTER	: Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi

A. Kondisi Umum**1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Balikpapan**

Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) merupakan politeknik pertama yang didirikan di kota Balikpapan pada tahun 2002 dengan nama Politeknik Balikpapan dan masih berstatus perguruan tinggi swasta. Politeknik Balikpapan memulai penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik 2002/2003 dengan membuka 4 (empat) program studi pertamanya yang terbagi dalam bidang rekayasa dan bidang non rekayasa, diantaranya: Bidang Rekayasa yang terdiri dari; Prodi Teknik Mesin Alat Berat (DIII), Prodi Teknik Elektronika (DIII), Prodi Teknik Sipil(DIII), Serta Bidang Non Rekayasa yang terdiri dari; Prodi Tata Boga (DIII).

Pada tahun 2010, Politeknik Balikpapan mendapatkan penilaian dari BAN-PT dengan terbitnya Surat Keputusan BAN-PT No.001/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/V/2010 untuk semua program studi yaitu: Teknik Mesin Alat Berat (B), Tata Boga (B), Teknik Elektronika (C), dan Teknik Sipil (C). Pada akhirnya tanggal 9 September 2011 Politeknik Balikpapan telah resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan ditandatanganinya Permendiknas Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan, sehingga sejak saat itu berubah status menjadi perguruan tinggi negeri yaitu Politeknik Negeri Balikpapan.

Pada tahun 2012 Poltekba melakukan perubahan nama masing-masing program studi sebagai penyesuaian dengan nomenklatur, perubahan nama yang dimaksud tertuang dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 299/E/O/2012, antara lain: 1) dari Program Studi Teknik Mesin Alat Berat menjadi Program Studi Alat Berat, 2) Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Elektronika menjadi dan Program Studi Tata Boga tidak mengalami perubahan nomenklatur.

Dalam pengembangan yang berkelanjutan, Poltekba terus melakukan Upaya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kapasitas dalam rangka menjawab

kebutuhan stake holder dari industri Kalimantan dan dari industri nasional maupun internasional pada umumnya. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan membuka jurusan baru yaitu Jurusan Akutansi dan beberapa program studi baru pada jurusan-jurusan yang ada. Hingga saat ini Poltekba telah memiliki 5 (lima) jurusan dan 10 (sepuluh) Prodi, diantaranya: **Jurusan Mesin** terdiri dari Prodi D-III Alat Berat dan Prodi D-IV Teknologi Rekayasa Manufaktur; **Jurusan Teknik Sipil** terdiri dari Prodi D-III Teknik Sipil dan Prodi D-IV Teknik Konstruksi Rekayasa Jalan dan Jembatan; **Jurusan Rekayasa Elektro** terdiri dari Prodi D-III Teknik Elektronika dan Prodi D-III Teknologi Listrik; **Jurusan Pariwisata** terdiri dari Prodi D-III Tata Boga dan Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan, **Jurusan Bisnis** terdiri dari Prodi D-IV Perbankan Keuangan Digital dan Prodi D-IV Akuntansi Perpajakan.

Capaian Renstra 2014-2019

Kinerja Politeknik Negeri Balikpapan pada Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada beberapa capaian sebagai berikut :

Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Lulusan

a. Jumlah Ketersediaan Buku Ajar (sesuai Kurikulum 2014)



Pengadaan buku ajar merupakan salah satu program yang harus diadakan tiap tahun. Waktu penyusunan buku ajar ditetapkan ketika dana DIPA dibagikan. Dalam praktiknya tiap jurusan mendapat tugas untuk membagi penulisan buku ajar ke beberapa dosen yang ditunjuk sesuai dengan keahlian. Di setiap tahun target penulisan buku ajar tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Dari proses tinjauan didapatkan beberapa kendala penulisan buku ajar yaitu beberapa dosen yang

diberi kewajiban menulis buku ajar merangkap jabatan tertentu sehingga beban kerja *double job* menjadikan kewajiban tumpang tindih. Kendala lainnya adalah beban mengajar dosen yang tinggi sehingga waktu penulisan buku ajar terbatas. Ketika beban mengajar tinggi otomatis alokasi waktu untuk penulisan buku ajar menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi tugas dosen tidak hanya mengajar tetapi juga harus melakukan penelitian dan pengabdian. Pemberian reward buku ajar tahun belakangan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemberian *reward* diberikan di awal, digunakan untuk memicu semangat penulisan buku ajar, tetapi dalam praktiknya beberapa dosen tidak bisa menyelesaikan buku ajar tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Beberapa dosen mendapat tunggakan penulisan buku ajar karena jangka waktu yang dibutuhkan melebihi tahun anggaran. Hal ini membuat kebijakan sedikit berubah yaitu pemberian *reward* buku ajar dilakukan setelah buku ajar telah selesai ditulis oleh dosen yang bersangkutan untuk kemudian diserahkan ke P4MP dan dilakukan proses review.

b. Jumlah Sesi Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Industri



Kuliah tamu menjadi agenda rutin tahunan setiap jurusan. Angka penyelenggaraan kuliah tamu menunjukkan angka yang stagnan. Hal ini dikarenakan jurusan hanya mengagendakan minimal 1 kali sampai 2 kali kuliah tamu. Jadi dengan fakta poltekba mempunyai 5 jurusan jadi dalam 1 tahun terdapat 10 kuliah tamu yang terselenggara. Program ini harusnya dilakukan karena kuliah tamu menjadi ajang diskusi antara mahasiswa dengan user secara langsung. Jadi mahasiswa mempunyai gambaran mengenai ilmu pengetahuan dan skill yang dibutuhkan oleh user. Juga sebagai tempat untuk mendapat pengalaman ilmu secara langsung dari

ahlinya, tidak hanya sekedar teori di kelas. Angka yang stagnan ini juga dikarenakan akses jurusan untuk mencari praktisi yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

c. Jumlah Proposal PKM yang Diajukan ke Dikti



PKM menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menghasilkan ide-ide terbaik mereka. Program ini bisa berjalan dengan baik tiap tahunnya karena anggaran dibebankan ke Kemenristekdikti. Jadi probabilitas ketersediaan anggaran akan selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2016, jumlah proposal melebihi target karena ada program pendampingan dari dosen di setiap jurusan sehingga minat mahasiswa untuk mengikuti program tersebut tinggi.

d. Jumlah Perusahaan yang melakukan Rekrutmen di Kampus



Jumlah perusahaan yang melakukan rekrutmen dengan Poltekba menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah PT. Harmonica Panca Utama, PT Hexindo, PT. Thiess dan lain-lain. Kepercayaan perusahaan untuk menjalin kerjasama dalam perekrutan tenaga kerja di Poltekba biasanya dilakukan dengan adanya bursa lapangan kerja atau *jobfair* yang biasanya dilakukan di bulan Oktober. Ketercapaian target ini dikarenakan lapangan kerja yang luas dan keterserapan tenaga siap pakai lulusan Poltekba yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri di Kalimantan. Poltekba melalui unit CDC juga berperan aktif dalam hal pemberian informasi lowongan kerja baik di kampus maupun di website CDC.

e. Lulusan yang Bekerja Kurang dari 6 Bulan



Unit Pelaksana Teknis *Career and Development Center* (UPT CDC) sebagai unit pelaksana yang berhubungan dengan keterserapan lulusan Poltekba menerapkan beberapa strategi yaitu sebelum mahasiswa lulus mereka diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke website alumni Poltekba dan juga pemanggilan fresh graduate apabila terdapat perusahaan yang kriterianya sesuai dengan kompetensi lulusan. Dengan cara ini prosentase lulusan yang bekerja sebelum 6 bulan meningkat setiap tahun.

f. Jumlah Perusahaan yang Menerima Lulusan



Jumlah perusahaan yang menerima lulusan secara keseluruhan menunjukkan jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Kerjasama terus ditingkatkan dengan perusahaan-perusahaan di Balikpapan setiap tahunnya guna menampung lulusan dari Poltekba yang terus meningkat. Prosesi wisuda menjadi ajang untuk penandatanganan nota kesepahaman antara pihak perusahaan dan pihak kampus. Perusahaan yang digandeng di sector tambang, perbankan, dan lain-lain.

g. Luas Perpustakaan (m2)



Luas perpustakaan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 stagnan karena perpustakaan Poltekba yang berada di lantai 2 Gedung Elektro tidak mendapat

anggaran perluasan. Anggaran hanya seputar pengadaan buku literature dan fasilitas perpustakaan tetapi belum ada upaya untuk memperluas bangunan perpustakaan. Padahal di dalam perpustakaan sudah dibangun Bank Indonesia Corner yang sepatutnya terdapat space tersendiri untuk bagian tersebut.

h. Jumlah Judul Literatur



Di tahun 2016 target pengadaan judul literature tidak tercapai karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan literature. Selain itu juga terdapat kesulitan dalam hal pemesanan buku teknik karena banyak buku referensi berasal dari luar negeri. Jumlah judul buku yang naik setiap tahun karena anggaran yang diberikan juga naik setiap tahunnya. Penambahan judul literature ini dilakukan karena jumlah mahasiswa juga terus meningkat sehingga kebutuhan buku terus ditingkatkan. Pengadaan buku ini meliputi buku-buku kejuruan dan buku-buku penunjang. Namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yang tinggi untuk penambahan judul literatur.

i. Jumlah Judul Buku Ajar



Judul buku ajar terus ditingkatkan karena jumlah dosen juga bertambah sehingga pemenuhan akan buku ajar mata kuliah dapat tercapai. Setiap tahunnya terdapat penganggaran buku ajar sebesar 5 juta rupiah dan 4 juta untuk job sheet. System pembayaran dilakukan setelah buku ajar selesai karena tahun-tahun sebelumnya ketika anggaran diberikan di awal, buku ajar dan job sheet tidak bisa diselesaikan dengan baik dan molor dari jangka waktu yang telah ditentukan.

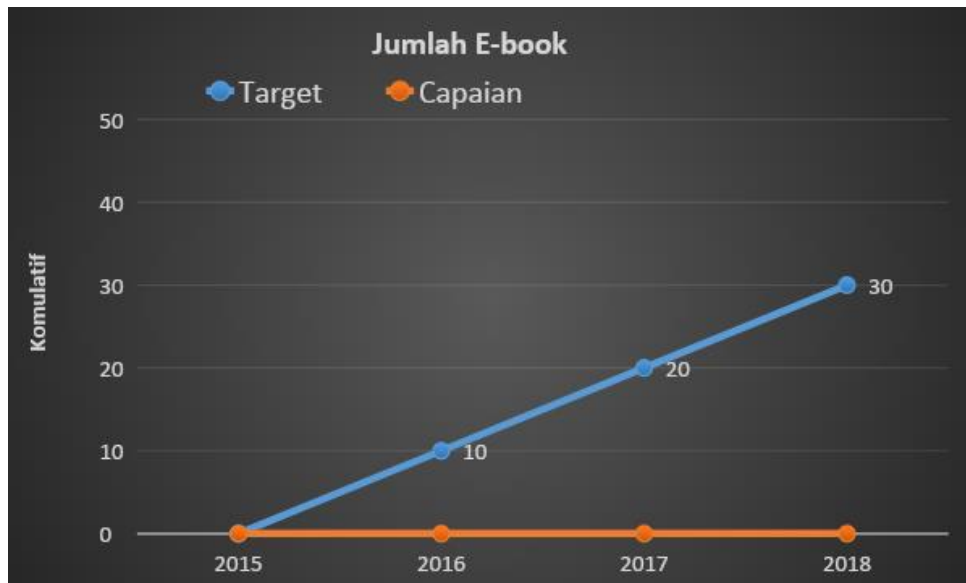
j. Jumlah Jurnal Ilmiah yang Dilanggan



Jurnal ilmiah tidak dilanggan oleh Poltekba karena jika menilik anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar jurnal ilmiah cukup besar. Hal ini tidak

sebanding dengan jumlah user yang menggunakan atau mengakses jurnal ilmiah tersebut. Meskipun sudah terdapat beberapa saran dari dosen untuk berlangganan jurnal ilmiah mengingat kebutuhan dosen Poltekba akan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal. Saran ini muncul karena jika kampus berlangganan dengan jurnal ilmiah tertentu, dosen akan dengan mudah mendapatkan sumber yang otentik.

k. Jumlah E-Book



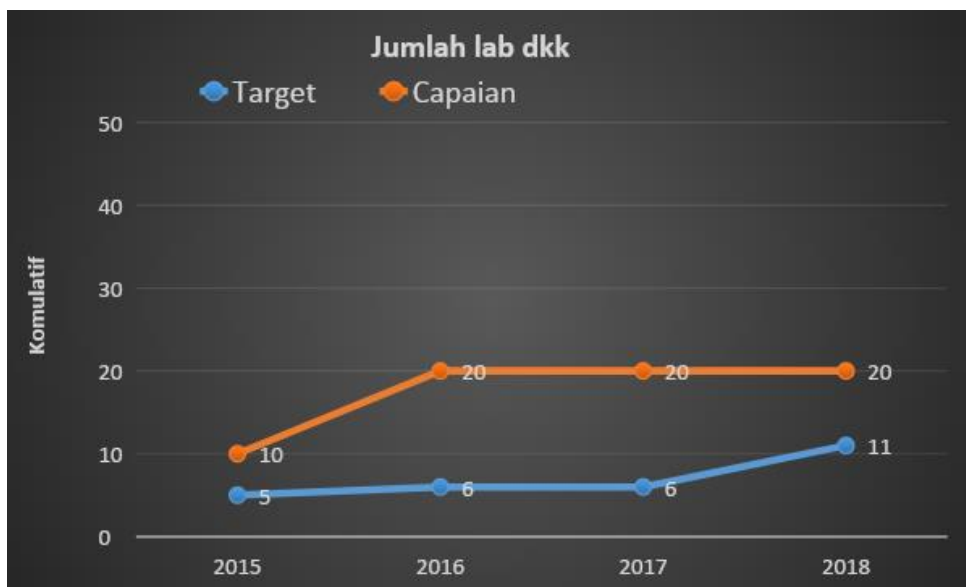
Pengadaan E-book dirasa belum perlu karena E-book bisa didownload oleh masing-masing mahasiswa atas saran dosen masing-masing sehingga kebutuhan akan E-book yang disediakan oleh perpustakaan menjadi hal yang belum urgent.

l. Jumlah E-Journal



Jumlah e-journal yang tersedia di layanan perpustakaan menunjukkan angka '0' karena belum adanya sistem yang terintegrasi antara jurnal yang tersedia dengan layanan perpustakaan. Di jurusan Teknik Sipil sudah dikembangkan tata kelola e-journal meskipun masih dalam tahap pengembangan. Jadi mahasiswa lulus ujian Tugas Akhir diharapkan untuk membuat jurnal yang kemudian di upload ke website yang sudah ditentukan.

m. Jumlah Lab/Bengkel/Tempat Praktek Lainnya



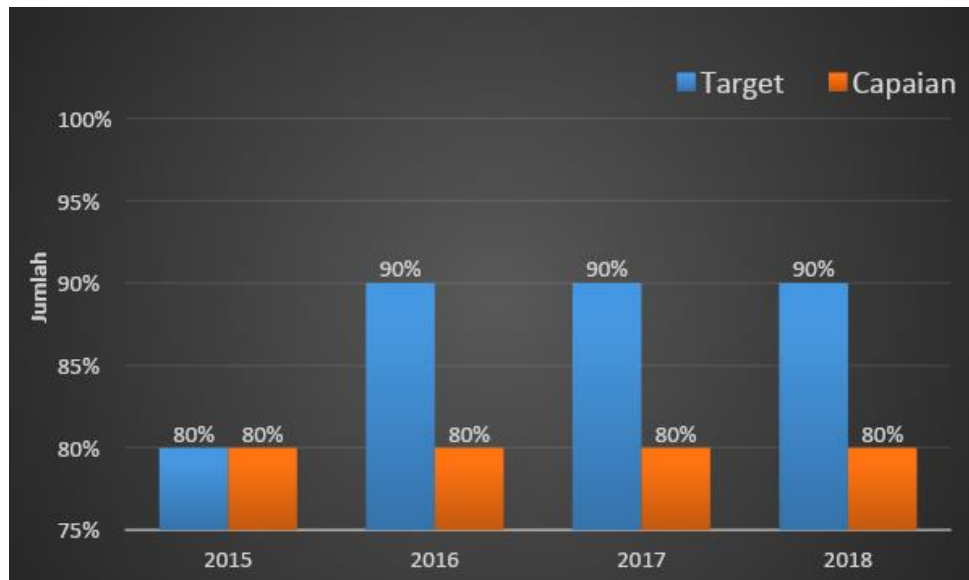
n. Jumlah Ruang Lab



Jumlah lab pada tahun 2016 meningkat tajam dikarenakan pada tahun

sebelumnya gedung Elektro lantai 2 yang sebelumnya pada tahun 2015 difungsikan sebagai ruang perkuliahan dialihfungsikan sebagai ruang lab/praktik.

o. Prosentase Ketersediaan Alat untuk Mata Kuliah Praktek



Prosentase ketersediaan alat untuk mata kuliah praktik belum menunjukkan prosentase yang optimal contohnya di Jurusan Tata Boga yang banyak sekali alat rusak tetapi karena tidak adanya anggaran untuk pembelian alat baru. Di Jurusan Elektro juga mengalami masalah yang serupa yaitu kekurangannya alat. Kekurangan alat ini disiasati dengan pengerjaan pekerjaan secara berkelompok.

p. Prosentase Ketersediaan Bahan Praktek



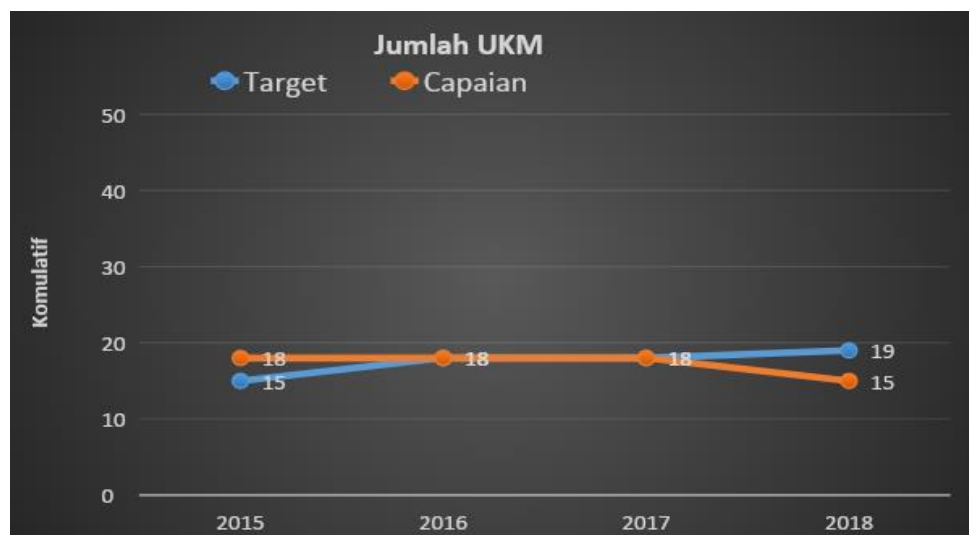
Bahan praktek merupakan penunjang dari mata kuliah praktek sehingga ketersediaan bahan praktek menjadi hal yang krusial. Di Jurusan Tata Boga bahan praktek biasanya sekali pakai karena digunakan untuk membuat masakan jadi. Kekurangan bahan praktek disiasati dengan menurunkan kualitas bahan yang dibeli. Hal ini juga dilakukan di Jurusan Teknik Sipil. Jadi dalam prakteknya mahasiswa tidak sampai kekurangan bahan untuk praktek.

q. Jumlah Ruang Kuliah



Jumlah ruang kuliah meningkat di tahun 2016. Di tahun sebelumnya ruang kuliah yang hanya dipergunakan hanya gedung Elektro saja, tetapi di tahun selanjutnya dengan selesainya pembangunan Gedung Terpadu, jumlah ruang kuliah bertambah banyak.

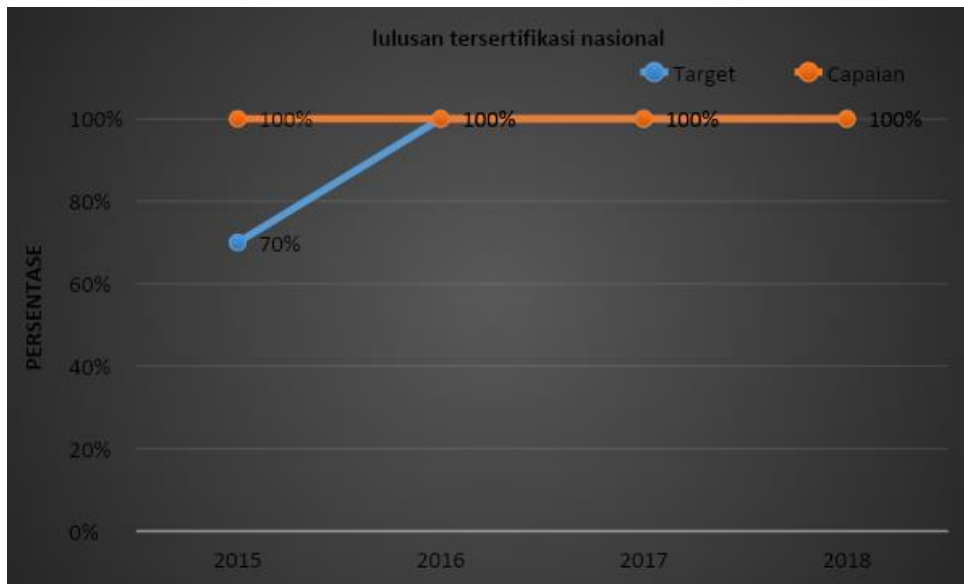
r. Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa





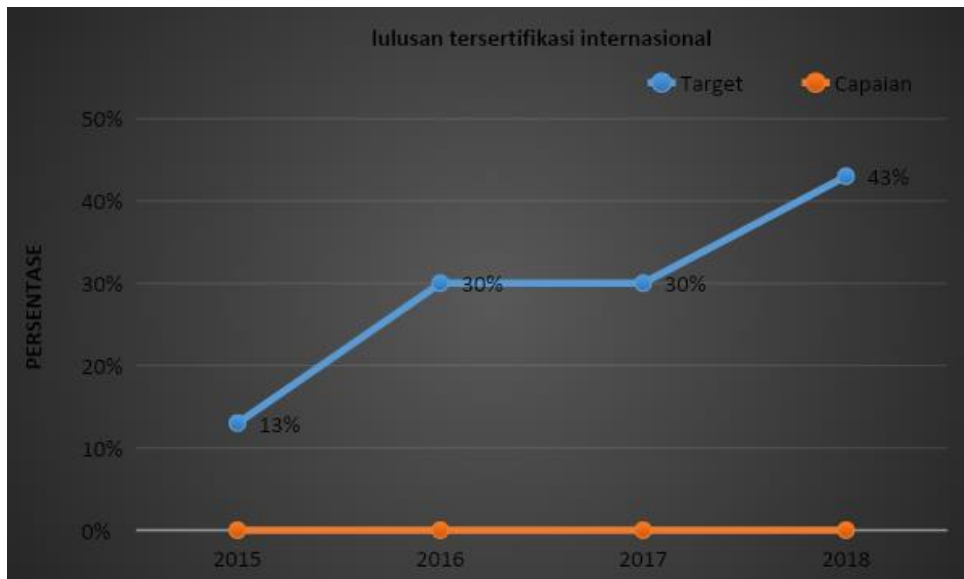
Secara garis besar jumlah mahasiswa yang mengikuti UKM menunjukkan angka yang lebih dari target per tahunnya hal ini di karenakan mahasiwa yang tidak mengikuti BEM wajib mengikuti paling tidak satu UKM. Jumlah UKM menunjukkan penurunan atau tidak aktif karena turunnya animo untuk beberapa UKM. Fasilitas UKM yang tersedia juga terbatas karena tidak adanya anggaran untuk pengembangan UKM. Dana pembinaan UKM yang sebelumnya 10 juta per UKM turun menjadi 3.1 juta per tahunnya. Anggaran ini dirasa sangat kurang untuk membuaya biaya operasional UKM. Apalgi jika lomba diadakan di luar kota. Tidak jarang mahasiswa harus mengeluarkan uang sendiri jika mereka lomba di luar kota. Tuntutan lomba yang harus menjadi pemenang juga dirasakan sulit untuk mahasiswa, sehingga animo mahasiswa untuk mengikuti perlombaan kurang. Poltekba merupakan kampus baru jadi memerlukan proses dalam sebuah pertandingan atau lomba. Rendahnya mental bertanding juga menjadi permasalahan mahasiswa ketika mengikuti perlombaan, yang biasanya waktu perlombaan bertabrakan dengan waktu perkuliahan sehingga persiapan menjadi tidak maksimal.

s. Jumlah Lulusan Tersertifikasi Kompetensi Level Nasional



Jika melihat grafik diatas, angka stagnan di poin 100 karena sertifikasi nasional menjadi syarat kelulusan untuk semua mahasiswa di Poltekba. Uji kompetensi dilakukan setiap tahun oleh setiap jurusan.

t. Jumlah Lulusan Tersertifikasi Kompetensi Level Internasional



Jumlah lulusan tersertifikasi kompetensi level Internasional menunjukkan angka yang stagnan di poin 0 karena tidak adanya kerjasama antara kampus dengan lembaga penyedia sertifikasi internasional. Salah satu alasannya adalah biaya pembayaran sertifikasi yang mahal dan keterpakaian sertifikat tersebut di area kerja wilayah Balikpapan yang cenderung cukup menggunakan sertifikat dari

lembaga berbasis nasional.


u. Kemampuan Bahasa Inggris



Kendala dalam tes TOEFL adalah kurang variatifnya jumlah paket soal TOEFL yang tersedia. Di setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti ujian TOEFL dengan kriteria score tertentu. Seringkali mahasiswa harus mengulang tes beberapa kali karena score mereka tidak mencapai target yang disyaratkan. Tujuan mahasiswa mengulang tes adalah mahasiswa dapat berlatih dengan paket soal yang variatif sehingga kemampuan mahasiswa tersebut meningkat. Dalam praktiknya mahasiswa mendapat paket soal yang sama sehingga tujuan berlatih dengan paket soal yang variatif tidak tercapai.

v. Kelompok Mahasiswa Lolos Seleksi PKM





Di tahun 2015 jumlah mahasiswa yang lolos Program Kewirausahaan Mahasiswa internal kurang dari target karena minat yang rendah dari mahasiswa untuk membuat proposal dalam bidang kewirausahaan. Di tahun-tahun selanjutnya animo mahasiswa tinggi karena sosialisasi dari Tim penggerak Program Kewirausahaan dari kampus cukup gencar untuk mengajak mahasiswa membuat dan mengajukan proposal bidang kewirausahaan.

2. Latar Belakang Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024

Politeknik Negeri Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri satker yang dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah dibuat menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 dimana terdapat sasaran pengembangan yaitu: 1) Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri; 2) Meningkatnya Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi dan termanfaatkan dalam dunia kerja; 3) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi.

Selain mandat dari kementerian, IKU Politeknik Negeri Balikpapan harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri sebagai upaya menjamin lembaga pendidikan tinggi yang memiliki daya adaptasi yang adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman dan lebih berdampak langsung bagi masyarakat serta mampu mencapai standar internasional perguruan tinggi.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Politeknik Negeri Balikpapan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024 yang menjadikan 3 indikator utama yaitu Pertama, meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang diukur dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa berkegiatan/prestasi di luar kampus. Kedua, meningkatnya kualitas dosen yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, kualifikasi dosen, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat

rekognisi internasional. Ketiga, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang memiliki sub indikator antara lain program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

3. Latar Belakang Revisi Renstra Pertama

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelayanan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Balikpapan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. Menetapkan rencana kinerja;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Melalui perubahan kebijakan di atas, menyebabkan Politeknik Negeri Balikpapan perlu adanya perubahan/revisi pada Renstra Politeknik Negeri Balikpapan Periode 2020-2024.

4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelayanan Layanan Pendidikan Tinggi di Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Politeknik Negeri Balikpapan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. Menetapkan rencana kinerja;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Melalui perubahan kebijakan di atas, menyebabkan Politeknik Negeri Balikpapan perlu kembali melakukan perubahan/revisi pada Renstra Politeknik Negeri

Balikpapan Periode 2020-2024.

B. Landasan Hukum

Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan renstra Politeknik Negeri Balikpapan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Permendikbudristek No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
10. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/ 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kemendikbudristek.
12. PMK No 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud dalam penyusunan Renstra Politeknik Negeri Balikpapan yaitu :

1. Menjadi pedoman dalam pengembangan institusi secara berkelanjutan dengan fokus pada visi, misi, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Menetapkan arah strategis jangka menengah untuk mencapai tujuan jangka panjang institusi.
3. Menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan akademik, administratif, dan penunjang dalam satu panduan strategis.

Tujuan dalam penyusunan Renstra Politeknik Negeri Balikpapan adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Balikpapan dalam konteks lokal, nasional, dan global.
2. Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengajaran dan penelitian yang berkualitas.
3. Melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan masukan untuk peningkatan konteks akademik dan administratif.

D. Kondisi Internal

1. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja Poltekba berpedoman pada Statuta Poltekba dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan yang diturunkan dalam Surat Keputusan Direktur Poltekba No.04/SK/DIR/II/2012 tentang Re- Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Negeri Balikpapan dalam penyelenggaraannya mengacu pada kelembagaan, kebijakan dan peraturan serta kode etik. Dalam struktur organisasi Poltekba tersebut memperlihatkan secara jelas kelembagaan Poltekba serta hubungan komunikasi

antara unsur Pimpinan Poltekba terhadap lembaga-lembaga atau unit kerja yang berada di lingkungan Poltekba. Seperti yang telah ditetapkan dalam Statuta Poltekba bahwa dalam pelaksanaannya, Poltekba menetapkan wewenang dan tanggung jawab bagi pelaku tata pamong yang terdiri dari:

1. Direktur
2. Wakil Direktur I (WD I)
3. Wakil Direktur II (WDII)
4. Wakil Direktur III (WDIII)
5. Kepala Pusat:
 - a. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
 - b. Ka.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
6. Ketua Jurusan
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Ka.Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
 - b. Ka.Unit Pelaksana Teknis Bahasa
 - c. Ka.Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi
 - d. Ka.Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Konseling
8. Koordinator:
 - a. Bidang Akademik
 - b. Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan
 - c. Bidang Perencanaan
 - d. Bidang Keuangan
 - e. Bidang Kepegawaian
 - f. Bidang Umum

Adapun perangkat pendukung Organisasi di Lingkungan Poltekba antara lain:

- a. Senat
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Dewan Pertimbangan

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah total SDM Poltekba saat ini adalah 94 dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 ada 6 dosen, sedangkan untuk Tenaga Kependidikan ada 82 pegawai dengan kualifikasi Pendidikan S2: 2 pegawai, S1: 34 pegawai, D3: 24 pegawai, SLTA: 22 pegawai. ± 50% dosen Poltekba memiliki jabatan akademik Lektor. Saat ini baru 3 orang dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, yaitu 3,2%. Dan ada 3 orang dosen yang sedang dalam proses pengajuan jabatan akademik Lektor Kepala. Sebagai upaya untuk meningkatkan jabatan fungsional dosen, Poltekba melakukan upaya yaitu, menghimbau kepada dosen dengan kualifikasi S3 agar bisa segera mengajukan usulan kenaikan pangkat dan bagi dosen S2 di dorong untuk publikasi pada jurnal nasional akreditasi sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi agar bisa segera mengajukan kenaikan jabatan akademik menjadi Lektor Kepala. Dari institusi juga telah menambah periode pengusulan jabatan fungsional dosen yaitu periode Januari, April, September dan Nopember serta mengadakan workshop tiap untuk edukasi pengusulan jabatan fungsional dosen. Selain kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen, sebagian besar dosen Poltekba juga telah tersertifikasi. Profesionalisme dosen diukur dengan menggunakan uji kompetensi yang di legitimasi melalui program sertifikasi dosen. Kompetensi dasar bagi seorang dosen terdiri dari kompetensi pedagogic, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dosen yang mendapatkan sertifikat Pendidikan profesional sebanyak 49 orang itu berarti 52,13% dari jumlah dosen Poltekba.

Sedangkan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan dari 82 pegawai tersebar pada 18 unit kerja. Tiap tahun Poltekba memberikan kesempatan dan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek/workshop. Poltekba juga memberikan support dengan sarana dan prasarana pendukung seperti PC/laptop, printer scanner yang digunakan bersama, ruangan kerja yang memadai, jaringan internet, serta sistem informasi agar terjamin kemudahan serta kelancarannya dalam bekerja. Untuk tenaga kependidikan seperti Laboran/teknisi telah diikuti pelatihan teknisi dan beberapa laboran telah memiliki sertifikat keahlian dan mendapatkan sertifikat asesor kompetensi. Jumlah laboran/teknisi berjumlah 12

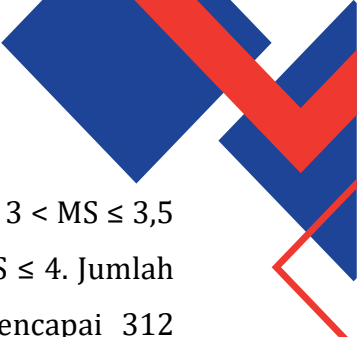
pegawai dari 40 Laboratorium yang ada di Poltekba.

Kinerja dosen dalam melaksanakan tugas tridharma dibuktikan dengan produktivitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dicapai, baik sumber dana yang disediakan dari dana perguruan tinggi, dana mandiri dan dana dari lembaga dalam negeri di luar perguruan tinggi. Data pada laman simlibtabmas menunjukkan kinerja dosen Poltekba seperti jumlah usulan proposal penelitian sebanyak 9 tim peneliti pada tahun 2015 dan 27 tim peneliti pada tahun 2019. Untuk luaran jurnal sebanyak 22 jurnal yang terpublikasi pada tahun 2015 dan 39 jurnal yang terpublikasi pada tahun 2018 yang terdiri dari jurnal nasional internal, jurnal nasional eksternal dan jurnal internasional. Kinerja dosen berikutnya pada kegiatan PkM, sesuai data yang ditunjukkan pada laman simlibtabmas bahwa sampai pada tahun 2019 jumlah tim pelaksana pengabdian sebanyak 48 tim untuk anggaran DIPA Poltekba dan 4 tim untuk anggaran DIPA DRPM. Rekognisi beberapa dosen Poltekba telah dipercaya dan cukup aktif sebagai tim ahli, tim teknis, tim perencana dan pengawas, reviewer dan narasumber.

3. Mahasiswa dan Lulusan

Penerimaan mahasiswa baru Poltekba mengacu pada standar yang ditetapkan. Proses seleksi dilakukan kepada calon mahasiswa guna menghasilkan mahasiswa yang kompeten. Proses seleksi mahasiswa baru yang dilakukan adalah ujian tertulis, tes kesehatan dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui intelektual dan motivasi calon mahasiswa. Dari hasil seleksi pada saat penerimaan Poltekba mendapatkan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. Rasio rekapitulasi jumlah pendaftar ulang terhadap lulus seleksi selama 5 tahun adalah 1:3,96 dan persentase rekapitulasi jumlah pendaftar ulang terhadap lulus seleksi selama 5 tahun adalah 91% dan jumlah mahasiswa Poltekba pada tahun Akademik 2021-2022 adalah sebanyak 1466 Mahasiswa.


Efektivitas dan produktivitas pendidikan Poltekba dapat ditunjukkan dari Rata-rata Masa Studi Lulusan; Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi. Dari grafik di atas menunjukkan rata-rata masa studi lulusan untuk Program Pendidikan Diploma Tiga adalah 3 tahun dan Program Pendidikan Diploma Empat



adalah 4 tahun. Masa studi lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga $3 < MS \leq 3,5$ dan Masa studi lulusan Program Pendidikan Diploma Empat $3,5 < MS \leq 4$. Jumlah lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga, pada tahun 2020, mencapai 312 dengan rata-rata IPK lulusan sebesar 3,43. Untuk tahun 2021, jumlah lulusan mencapai 315 dengan rata-rata IPK Lulusan 3,55. Kemudian, di tahun 2022 jumlah lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga meningkat, hingga 353 lulusan dengan rata-rata IPK lulusan sebesar 3,48. Di tahun 2022, program pendidikan Diploma Empat / Sarjana Terapan yang dimiliki oleh Poltekba, prodi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan (TRKJJ) pertama kali memiliki lulusan yang mencapai 22, dengan rata-rata IPK lulusan sebesar 3,38. Program pendidikan Diploma Empat / Sarjana Terapan yang telah terdapat lulusan adalah Prodi D4 TRKJJ, prodi Diploma Empat / Sarjana Terapan lainnya masih belum memiliki lulusan. Peningkatan jumlah lulusan dari tahun ke tahun terjadi karena antusias masyarakat sekitar untuk melanjutkan studi di Poltekba, sehingga penerimaan jumlah mahasiswa pun menyesuaikan. Selain itu capaian prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik juga menjadi daya tarik tersendiri dalam tercapainya mutu di lingkungan Pendidikan Poltekba.

Berkaitan hal tersebut di atas dapat ditunjukkan dari dampak yang positif dengan diraihnya prestasi akademik dan prestasi non akademik mahasiswa Poltekba. Selama 5 Tahun terakhir, jumlah Prestasi Akademik Mahasiswa Poltekba tercatat sebanyak 37 Prestasi. Diantaranya 26 prestasi akademik di Tingkat Nasional dan 11 prestasi akademik di tingkat Provinsi / Wilayah. Pada tahun 2022, terdapat 15 Prestasi Akademik Mahasiswa, 11 diantaranya merupakan prestasi di tingkat Nasional. Sedangkan untuk Prestasi Non- sebanyak 58 Prestasi, selain prestasi regional ada 11 prestasi di tingkat nasional dan 3 prestasi di tingkat Internasional. Salah satunya yang diperoleh pada Southeast Asian Men & Women Beach Handball Championship. Poltekba mendukung penuh keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan akademik dan non-akademik pada tingkat Provinsi/Wilayah; Nasional hingga Internasional.

Dari hasil tracer study menunjukkan rata-rata waktu tunggu lulusan Poltekba untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah sebesar 3,00 bulan atau ≤ 3 bulan. Lulusan TS-2 memperoleh waktu tunggu paling pendek untuk memperoleh



pekerjaan pertama dan kesesuaian bidang kerja lulusan dari tahun ke tahun semakin baik. Lulusan bekerja sesuai dengan bidang dan kompetensi yang diperoleh di Perguruan Tinggi. Lulusan angkatan TS-4 yang bekerja sesuai dengan bidang mencapai 87,5%. Kemudian, lulusan angkatan TS-3 yang bekerja sesuai dengan bidang mencapai 88% dan lulusan angkatan TS-2 yang bekerja sesuai dengan bidang mencapai 90,2%. Rata-rata persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang kerja dan bidang studi sebesar 88,57% atau $\geq 80\%$. Jika melihat dari hasil survey pengguna lulusan, IDUKA juga sangat puas dengan kinerja lulusan Poltekba. Survey pengguna ini kita menggunakan 7 aspek yaitu, Etika; Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama); Kemampuan berbahasa asing; Penggunaan teknologi dan informasi; Kemampuan berkomunikasi; Kerjasama; dan Pengembangan Diri.

4. Kurikulum

Penyesuaian/peninjauan kurikulum setiap program studi pada Poltekba telah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan yaitu setiap satu siklus pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketersediaan aturan terkait kelengkapan dokumen perkuliahan (RPS, Jurnal dan Kontrak Pembelajaran) pada awal perkuliahan. Ketersediaan koleksi buku di perpustakaan dengan jumlah judul relatif lengkap. Ketersediaan blended learning yang memudahkan proses pembelajaran berbasis online. Proses pembelajaran sudah mengarah kepada konsep pembelajaran terpusat pada mahasiswa (student center). Monitoring dan evaluasi pembelajaran internal sudah dilakukan secara berkala.


5. Penelitian dan Pengabdian masyarakat

Kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Poltekba dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Dalam mengembangkan kegiatan Penelitian dan Pengabdian mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

Visi P3M: “Menjadi Pusat Unggulan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang ilmu Teknologi Terapan yang terkemuka di Indonesia.”

Misi P3M:

1. Aktif mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam melaksanakan

- 
- Pengabdian Kepada Masyarakat bidang ilmu teknologi terapan;
2. Mendorong penerapan hasil Penelitian teknologi Terapan untuk pengabdian kepada masyarakat, kemajuan industri dan menjawab permasalahan bangsa;
 3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya IPTEK (Knowledge Management) dalam rangka optimalisasi hasil Penelitian dalam menjaga keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

Motto P3M:

“Bringing Invention, Innovation and Technology in life. (Membawa Penemuan, Inovasi dan Teknologi dalam Kehidupan.)”

Tujuan:

- 1) Penelitian Politeknik Balikpapan menghasilkan suatu Produk Inovatif yang dibutuhkan masyarakat dan industry.
- 2) Setiap dosen melakukan penelitian.
- 3) Hasil penelitian dapat dipublikasikan.
- 4) Hasil penelitian dapat memperoleh HAKI.
- 5) Hasil penelitian dapat memperkaya bahan ajar.

Dalam Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan dinyatakan bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


- sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Saat ini Poltekba sudah mengelola 3 jurnal melalui P3M yaitu (Jurnal Teknologi Terapan, Jurnal Sains dan Teknologi, dan Jurnal Social Humaniora). Kondisi ini membuat peluang dosen dan mahasiswa menjadi lebih luas dalam mempublikasikan karya ilmiahnya.

6. Sarana Prasarana dan Sistem informasi

Poltekba memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi pihak yang berkebutuhan khusus, diantaranya adalah: a) Laboratorium praktek yang ada di setiap jurusan dengan alat dan software yang mutakhir dalam mendukung pembelajaran mahasiswa secara langsung dengan sarana yang mendukung untuk pihak yang berkebutuhan khusus, b) teaching factory pada jurusan pariwisata dan juga kafe Bear & Honey yang siap melayani Masyarakat, c) Fasilitas laboratorium, gedung pertemuan serta prasarana lain juga digunakan untuk kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada Masyarakat, d) memiliki berbagai macam sistem informasi untuk layanan administrasi baik layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana (Aset) yang terbukti efektif seperti: Layanan integrasi yang menggabungkan layanan akademik, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan umum. Layanan akademik meliputi data mahasiswa, nilai, absensi kuliah, KHS, dll. Sedangkan layanan kepegawaian meliputi data pribadi pegawai, absensi, permintaan surat kepegawaian, dll. Layanan keuangan meliputi aplikasi gaji APBN dan juga honor PNBPN. Untuk lebih lengkapnya dapat dibuka pada laman yang telah disebutkan, Layanan akademik khusus mahasiswa yang terintegrasi dengan SIM Poltekba untuk mengecek KRS, KHS, Perwalian Dosen, Layanan online perpustakaan yang melayani peminjaman e-book untuk civitas akademika, dan masih banyak lagi sistem informasi.

Sistem informasi yang dikembangkan Poltekba sudah cukup lama dan terbukti sangat membantu Institusi untuk meningkatkan pelayanan. Poltekba memiliki strategi pengembangan sistem informasi yang selalu diselaraskan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan informasi.



Politeknik Negeri Balikpapan dalam bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah, industri, masyarakat, maupun institusi pendidikan lainnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan sumber dana maupun fasilitas dan informasi. Untuk itu Poltekba menyiapkan jaringan kerja sama melalui Informasi Teknologi dengan jaringan internet sebesar $2 \times 150 = 300$ Mbps.

Selain itu pemakaian jaringan komputer sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang relevan, dan seluruhnya sudah terhubung kesetiap gedung. Setiap gedung dihubungkan dengan dua jenis local area network, yaitu untuk Sistem Informasi Akademik (SIMAK) dan untuk internet. Layanan internet yang disediakan terdiri dari web Portal Politeknik Negeri Balikpapan (www.poltekba.ac.id).

UPT Informasi dan Komunikasi sudah mengembangkan aplikasi SIMAK. Selain itu juga menggunakan aplikasi yang disediakan Departemen Keuangan: Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara, Sistem Akuntansi Instansi dan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai serta aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Dikti.

Pada seluruh area kampus juga tersedia sambungan wi-fi internet dengan kapasitas bandwidth yang memadai, sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Poltekba memiliki website (www.poltekba.ac.id) sebagai media yang terpusat untuk penyebaran informasi penting berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi kepada para stakeholder.

Poltekba telah memiliki dan menjalankan teknologi dan sistem informasi di beberapa unit kerja (SIKAD, SPMI, SIAO, SSKA, dll). Kondisi ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan informasi yang cepat (real time), akurat, dan relevan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Pada seluruh ruangan unit kerja telah tersedia sambungan internet dengan kapasitas bandwidth yang memadai. Kondisi ini memungkinkan unit kerja dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka.

7. Kerjasama

Unit Kerjasama Poltekba mempunyai tugas dan wewenang untuk menginisiasi dan mengkoordinasikan kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri serta pemberdayaan Aset dan Hubungan Internasional (UKPHI). UKPHI sebagai sebuah unit mempunyai visi, misi serta moto yang mengacu dan menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan serta sasaran Poltekba.

Setiap pelaksanaan program kegiatan UKPHI dilandasi atas semangat Moto adalah: “widening the global perspective” maksudnya adalah pentingnya menjalin kerja sama (dalam dan luar negeri) untuk memperluas wawasan global. Kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dan masyarakat yang dilakukan Poltekba dikelompokkan berdasarkan kerja sama dalam dan luar negeri.

Politeknik Negeri Balikpapan memiliki jejaring dan mitra kerjasama berjumlah 97 jenis kerjasama yang terdiri atas 8 kerjasama wilayah lokal, 85 kerjasama nasional, dan 4 kerjasama internasional. Kerjasama yang dibangun oleh Poltekba dan mitra relevan dengan VMTS Poltekba diantaranya dalam hal pengembangan tridharma Poltekba berupa magang dosen dan mahasiswa, link and match kurikulum dengan industri, dan sharing knowledge dari praktisi industry. Sedangkan untuk bidang penelitian dan pengabdian, manfaat yang diperoleh oleh Poltekba dengan Kerjasama dengan mitra adalah naskah akademik kota layak huni dan ruang terbuka hijau Kota Balikpapan bersama pemerintah Kota Balikpapan.

E. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT (strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman)) Politeknik Negeri Balikpapan sebagai berikut :

a. Kekuatan :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran PS sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan dan Perguruan Tinggi;
2. Tingkat pemahaman SDM terhadap Visi misi sudah baik;
3. Poltekba sudah memiliki dokumen formal terkait tata pamong dan tata kelola dan Kerjasama;
4. Poltekba sudah mampu mengimplementasikan tata pamong dan tata kelola

- yang baik mengacu pada *good governance* dan 3 sifat kepemimpinan;
5. Manajemen penjamin mutu dan Gugus Kendali Mutu prodi berjalan Dengan baik
 6. Dosen yang berkualitas;
 7. Tersedianya layanan kemahasiswaan yang berkualitas dan berpengalaman;
 8. Sistem rekrutmen dosen dan tenaga pendidikan yang transparan dan professional;
 9. Produktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan partisipasi kegiatan ilmiah tinggi;
 10. Jumlah dosen yang bergelar magister tinggi;
 11. Alokasi dana operasional pendidikan melebihi standar minimal;
 12. Alokasi dana penelitian melebihi standar minimal;
 13. Alokasi dana pengabdian kepada masyarakat melebihi standar minimal Sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 14. Program studi memiliki dokumen kurikulum KKNi dimana didalamnya tercantum profil lulusan, struktur, dan capaian pembelajaran yang sesuai;
 15. Poltekba memiliki SPMI dan Poltekba memiliki GKM yang didukung sumber daya memadai untuk melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan dan pembelajaran;
 16. Relevansi penelitian dosen dengan bidang keilmuan prodi tinggi;
 17. Produktivitas penelitian/inovasi dosen tinggi yang selanjutnya dapat diimplementasikan ke masyarakat melalui PkM;
 18. Relevansi pengabdian kepada masyarakat dosen dengan bidang keilmuan prodi tinggi
 19. Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dosen tinggi.
 20. Sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan berada pada rentang usia produktifitas tinggi (<50 tahun).


b. Kelemahan :

1. Keterlibatan pihak eksternal dalam penyusunan VMTS masih belum optimal;
2. Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kolaborasi sebagian dari sivitas akademika masih perlu dioptimalisasikan untuk ketercapaian menjadi prodi yang unggul;

3. Kerjasama nasional dan internasional dalam bidang penelitian dan PkM masih belum ada;
4. Kemampuan Bahasa Asing mahasiswa masih perlu ditingkatkan;
5. Kemampuan bahasa Inggris sebagian besar dosen belum memadai;
6. Predikat APT adalah Baik;
7. Belum ada dana kerjasama dari swasta untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
8. Ketersediaan pembiayaan yang terbatas untuk mengembangkan kurikulum, pengembangan suasana akademik;
9. Kelengkapan dan pengetahuan dosen masih kurang mengenai dokumen SPMI/PPEPP khususnya mengenai standar pendidikan;
10. Jumlah dosen yang berpendidikan doktor rendah;
11. Belum dioptimalkannya pelaksanaan penelitian kerjasama lintas PT;
12. Belum ada penelitian yang sumber dananya dari luar negeri;
13. Belum dioptimalkannya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kerjasama lintas PT;
14. Belum ada pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya dari luar negeri;
15. Jurnal Internasional masih rendah;
16. Ketersediaan pembiayaan yang terbatas bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti berbagai kompetisi;
17. Sarana dan prasarana berstandar Internasional yang belum memadai;
18. Pemahaman dosen mengenai penjaminan mutu masih belum merata;
19. Mahasiswa lulus lebih dari 3 tahun (krn cuti akademik, tugas akhir).

c. Peluang

1. Poltekba sudah memiliki GKM yang dapat menjamin mutu pelayanan Poltekba;
2. Bertempat di Pulau Kalimantan sebagai tempat IKN;
3. Banyak forum untuk pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan;
4. Kesempatan Studi Lanjut Sangat Luas;
5. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Kalimantan Timur dan menempatkan kantor pusatnya di Balikpapan sebagai pengguna lulusan maupun sebagai mitra kerjasama bidang pendidikan, penelitian maupun

- 
- pengabdian kepada masyarakat;
6. Tersedianya akses berupa bandara internasional;
 7. Pembangunan infrastruktur yang pesat di wilayah Kalimantan Timur sebagai zona 3 dalam MP3EI, seperti pembangunan jaringan listrik interkoneksi antar Balikpapan-Bontang-Samarinda, pembangunan jalan tol dan kereta api, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja terdidik & terampil;
 8. Dana penelitian dan PKM sangat memadai;
 9. Terdapat UPT Bahasa yang memfasilitasi peningkatan bahasa asing;
 10. Poltekba memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pembelajaran;
 11. Dana penelitian sangat memadai;
 12. Banyak skema hibah penelitian yang dikompetisikan;
 13. Dana pengabdian kepada masyarakat sangat memadai;
 14. Banyak nya program hibah pelatihan/magang dari kementerian;
 15. Banyak skema hibah pengabdian kepada masyarakat yang dikompetisikan;
 16. Adanya berbagai kompetisi dari tingkat lokal sampai internasional yang dapat diikuti mahasiswa;
 17. Poltekba memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan penelitian dan PkM yang melibatkan mahasiswa;
 18. Poltekba sudah memiliki CDC yang menjembatani antara lulusan dengan industri.

d. Ancaman

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat sehingga menjadi kendala utk dapat secara cepat dapat menyesuaikan kebutuhan SDM vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Kebijakan kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang cenderung diberikan untuk mempersempit peluang kebutuhan lulusan program studi yang ada di Poltekba.
3. Pesaing yang ada semakin banyak sehingga membuat Poltekba semakin banyak pesaing untuk mendapatkan sumber calon mahasiswa yang berkualitas.
4. Sumber dosen yang berkompeten sesuai kebutuhan dunia usaha/industri yang sulit didapat baik secara lokal maupun nasional.

5. Bertambahnya perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang ada disekitar Politeknik negeri Balikpapan sehingga semakin tinggi pesaing Poltekba.

Dari uraian analisis SWOT Politeknik Negeri Balikpapan di atas dapat ditarik beberapa implikasi untuk menentukan strategi secara keseluruhan. Seperti pada umumnya, strategi ini dirancang untuk mengeksploitasi peluang secara optimal, selanjutnya merancang program yang bersifat antisipatif untuk menanggulangi munculnya potensi ancaman. Selanjutnya, kekuatan merupakan modal utama dalam merancang operasi dan memaksimalkan penggunaannya, serta merancang program untuk menghindarkan atau menghilangkan kelemahan yang dimiliki.

Berdasarkan posisi analisis SWOT di atas, maka Politeknik Negeri Balikpapan menyusun empat strategi utama yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada (S-O), meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W-O), menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari/mengatasi ancaman (S-T), dan meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi (W-T).

Strategi dan program pengembangan berdasarkan analisa kekuatan/strength dan kesempatan/opportunity (S-O), yaitu:

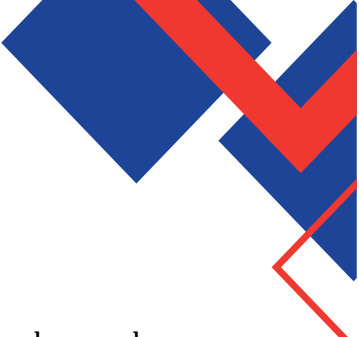
1. Meningkatkan Citra Institusi;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Berkembangnya Infrastruktur Pembelajaran;
4. Perluasan Kerjasama dan Jejaring.

Program dan strategi pengembangan berdasarkan analisa kelemahan/weakness dan kesempatan/opportunity (W-O), yaitu:

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Akademik;
2. Menguatnya Tata Laksana dan Organisasi;
3. Menguatnya SI dan Manajemen

Program dan strategi pengembangan berdasarkan analisa kekuatan/strength dan ancaman/threat (S-T), yaitu:

1. Meningkatkan Luaran Penelitian dan PkM;
2. Meningkatkan Kualitas Lulusan;
3. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni;

- 
4. Berkembangnya Jurusan/Program Studi
 5. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Program dan strategi pengembangan berdasarkan analisa kelemahan/weakness dan ancaman/threat (W-T), yaitu:

1. Menguatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Berdasarkan latar belakang, tujuan rasional dan tujuan penetapan visi misi tujuan dan strategi (VMTS) yang telah dijelaskan di atas maka Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) memiliki visi di bawah ini yang ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Politeknik Negeri Balikpapan Nomor: 135/PL32/TU/2015. POLTEKBA memiliki visi yaitu ***“Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing global”***. Visi yang dikembangkan oleh Poltekba memiliki orientasi terhadap pengembangan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan agar dapat berdaya saing internasional. Selain itu, visi dan misi tersebut juga dalam rangka menjawab kebutuhan SDM IDUKA baik dilihat dari dimensi kualitas/kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Ada tiga kata kunci penting untuk menjabarkan visi Poltekba yaitu (1) berkarakter, (2) unggul, dan (3) berdaya saing global.

Penjabaran ketiga kunci visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pernyataan berkarakter mengandung arti bahwa seluruh civitas Politeknik Negeri Balikpapan diharapkan mampu untuk memiliki kesadaran dalam penegakan kedisiplinan terkait penegakan aturan;
2. Pernyataan unggul, mengandung arti bahwa lulusan atau alumni Politeknik Negeri Balikpapan memiliki kompetensi yang cukup tinggi di bidang masing-masing sehingga dapat mudah dan cepat diserap oleh dunia kerja;
3. Pernyataan berdaya saing global mengandung arti bahwa Politeknik Negeri Balikpapan akan selalu mengikuti trend perkembangan baik dalam segi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan kelembagaan yang menunjang tercapainya kesetaraan kedudukan Politeknik Negeri Balikpapan dengan Perguruan Tinggi (PT) lainnya dalam tingkat nasional maupun internasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan dari visi tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang didukung dengan kurikulum dan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan standar yang berlaku;
2. Menyelenggarakan manajemen kelembagaan yang efisien, produktif, akuntabel, dan transparan serta berkeadilan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima dan meningkatnya kepercayaan publik;
3. Mengembangkan dan menghasilkan karya dan produk intelektual yang inovatif.

Adapun tujuan Poltekba yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing global yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan daya saing bangsa.
3. Meningkatkan mutu layanan organisasi yang efisien, produktif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang diakui oleh seluruh pengguna layanan organisasi baik nasional maupun internasional.
4. Terjalinnnya hubungan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta optimalisasi sumber daya Poltekba, baik secara nasional maupun internasional.

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang berkegiatan/ meraih prestasi di luar program studi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60%
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30%
2	Peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi dalam lingkup berkegiatan tridharma di PT lain, bekerja sebagai praktisi di dunia usaha industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus, memiliki kualifikasi dunia industri, dan memiliki karya	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30%
		Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	50
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.	100 Dosen
3	Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran melalui kemitraan program studi, pembelajaran dalam kelas, dan akreditasi internasional	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100 Kerjasama
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi	2.5%

		internasional yang diakui pemerintah	
4	Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	93
		Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang berkegiatan/ meraih prestasi di luar program studi	Meningkatnya kualitas lulusan Politeknik Negeri Balikpapan yang memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Serta meningkatnya jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau yang meraih prestasi
2	Peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi dalam lingkup berkegiatan tridharma di PT lain, bekerja sebagai praktisi di dunia usaha industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus, memiliki kualifikasi dunia industri, dan memiliki karya	Meningkatnya kualitas dosen Politeknik Negeri Balikpapan yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Meningkatnya kualitas dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri serta semakin bertambahnya jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. Dan meningkatnya kualitas dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah
3	Peningkatan	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

	Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran melalui kemitraan program studi, pembelajaran dalam kelas, dan akreditasi internasional	dengan bertambahnya jumlah kerjasama per program studi, serta mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi, dan program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
4	Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri	Meningkatnya tata kelola Politeknik Negeri Balikpapan dengan predikat SAKIP bernilai A, Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L bernilai 93, dan nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama bernilai minimal 75

• **Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran/Utama:**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	SK.1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
		IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

3	SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
		IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
4	SK.4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	IKU 4.1 Predikat SAKIP
		IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

Untuk mencapai visi POLTEKBA telah ditetapkan 4 (empat) misi, sehingga hal ini akan menjadi upaya untuk melakukan pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) yang diharapkan akan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. Upaya yang dimaksud selanjutnya akan dijabarkan dalam **Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan** di Politeknik Negeri Balikpapan:

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Politeknik Negeri Balikpapan turut berpartisipasi secara aktif dan terus menerus dalam meningkatkan daya saing nasional melalui program pengembangan yang berpedoman kepada arah kebijakan dan strategis Nasional. Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Politeknik Negeri Balikpapan mengacu pada 4 (empat) sasaran pokok dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran/utama yang dijabarkan sebagai berikut:

A.1. Sasaran Pokok: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

1. *(IKU 1.1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah lulusan D4/D3 yang berhasil mendapatkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tracer study terhadap alumni 2. Pelaksanaan pendidikan yang berorientasi kebutuhan dunia industri dan dunia usaha 3. Penerbitan surat keterangan pendamping ijazah 4. Meningkatkan kerjasama industri 5. MEME (Multi exit-Multi Entry)

Meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program alih jenjang untuk meningkatkan kualifikasi lulusan 2. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Meningkatkan jumlah lulusan yang berwirausaha	Mengembangkan muatan dan budaya kewirausahaan dalam pembelajaran serta memfasilitasi kegiatan kewirausahaan dengan alokasi dana hibah (dana bergulir), lomba kewirausahaan, kerjasama dengan pelaku usaha dan asosiasi profesi.

2. **(IKU 1.2)** *Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah mahasiswa D4/D3 menjalankan kegiatan di luar program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan belajar diluar kampus minimal 20 sks sebagai wujud kebijakan MBKM. 2. Mendorong program studi dalam memfasilitasi belajar mahasiswa di luar program studi 3. Mendorong program studi untuk melakukan kerjasama dengan industri dalam bidang pengembangan kurikulum dan magang
Meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan memastikan kualitas/mutu input calon mahasiswa pada setiap jalur penerimaan 2. Melengkapi sarana dan prasarana

	<p>untuk kegiatan baik akademik maupun non akademik</p> <p>3. Mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan kemahasiswaan, dan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti perlombaan di dalam dan luar negeri</p>
--	---

A.2. Sasaran Pokok; Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

1. **(IKU 2.1)** *Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	Meningkatkan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain Penguatan peran Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dalam implementasi Renstra Penelitian dan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
Meningkatkan jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	Pengembangan magang terstruktur berkerjasama dengan industri dan dunia usaha
Meningkatkan jumlah dosen untuk membimbing mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Menggiatkan dosen dalam pembinaan mahasiswa agar berprestasi tingkat nasional akademik dan non akademik.

2. **(IKU 2.2)** *Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah dosen untuk mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Non Degree Peningkatan Kompetensi Dosen Vokasi yang memungkinkan dosen untuk mengikuti pelatihan kompetensi yang ada di industri. 2. Mendorong dosen untuk melakukan kerja sama penelitian dengan industri.
Meningkatkan jumlah pengajar yang berasal dari kalangan profesional, dunia usaha dan dunia industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen industri agar dapat mengajar sebagai dosen praktisi 2. Mengikuti program kementerian (praktisi mengajar)

3. **(IKU 2.3)** *Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan <i>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Dosen untuk Publikasi luaran dosen pada jurnal internasional melalui pemberian insentif 2. Mendorong Dosen untuk melakukan penelitian kerjasama internasional 3. Program studi memiliki Rencana Induk Penelitian dan Renstra

	<p>PkM yang relevan dengan perkembangan keilmuan prodi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri dan dunia usaha</p> <ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan jumlah penelitian PkM kerjasama dengan stakeholder5. Menyelaraskan topik penelitian dan PkM kerjasama bersama-sama dengan stakeholder.6. Implementasi identifikasi masalah industri/masyarakat dan dijadikan masalah tersebut sebagai objek penelitian dosen.7. Mensinergikan penelitian dan PkM yang berorientasi pada pengembangan produk/jasa yang memberi nilai manfaat terhadap masyarakat, industri dan dunia usaha yang berdampak pada peningkatan kualitas bahan ajar dan proses pembelajaran serta publikasi ilmiah dan perolehan paten/HaKI lainnya.
--	--

A.3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

1. (IKU 3.1) Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah kerjasama per program studi D4/D3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin komunikasi dengan alumni secara intensif untuk membuka peluang sinergi dengan program studi masing-masing 2. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan stakeholder 3. Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion bersama stake holder untuk menyamakan persepsi. 4. Melibatkan industri dalam kegiatan akademik dan non akademik (workshop kurikulum, expo dan job fair)

2. (IKU 3.2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dan pengembangan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-base project).

	<p>2. Pembelajaran pada mata kuliah keahlian khusus diarahkan untuk menggunakan metode CBL/PjBL</p> <p>3. Bekerjasama industri untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan diterapkan dalam proses pembelajaran</p>
--	---

3. **(IKU 3.3)** *Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan jumlah <i>program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</i>	<p>Menyelenggarakan Bimtek dalam penyusunan borang akreditasi internasional</p> <p>Mengarah pada pada lembaga akreditasi internasional prodi masing-masing</p>

A.4. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

1. **(IKU 4.1)** Predikat SAKIP

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Predikat SAKIP	<p>1. Meningkatkan predikat dengan cara memenuhi rekomendasi dari inspektorat</p> <p>2. Melakukan perbaikan pada sistem pelaporan</p> <p>3. Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan produktif.</p>

	<p>4. Melaksanakan pengawasan perencanaan program secara ketat terhadap pelaksanaan Kinerja.</p> <p>5. Program difokuskan untuk mewujudkan outcomes (hasil).</p>
--	--

2. **IKU 4.2** *Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan <i>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</i>	<p>1. Memiliki laporan keuangan yang terstandar meliputi laporan pokok, realisasi anggaran, posisi keuangan, aktivitas dan aliran kas secara berkala</p> <p>2. Melaksanakan konsolidasi pemantauan penyerapan anggaran tiap bulan secara konsisten.</p>

3. **IKU 4.3** *Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75*

Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan <i>Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75</i>	<p>1. Melakukan Implementasi kebijakan dan prosedur yang transparan dan akuntabel.</p> <p>2. Peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas.</p> <p>3. Melakukan Pemantauan secara rutin terhadap implementasi strategi dan pencapaian target Zona Integritas.</p>

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis kebijakan Poltekba berpedoman kepada regulasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Direktur Poltekba tertuang dalam Matrik berikut ini:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Pengembangan kelambagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Penetapan Perubahan OTK Poltekba oleh Menteri	Tahun 2024
2	Peningkatan mutu layanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Keputusan Direktur tentang jenis dan tarif layanan yang berlaku di Poltekba	Tahun 2023
3	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang inovatif, bermutu dan berdaya guna	Keputusan Direktur tentang panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tahun 2021

C. Kerangka Kelembagaan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Balikpapan telah diatur dan terstruktur sesuai Permendiknas Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Politeknik Negeri Balikpapan, serta Statuta sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan. Semua organ baik pengelola maupun pengawasan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan akademik maupun non akademik dan bertanggung jawab kepada pimpinan Direktur selaku pimpinan organisasi. Sesuai dengan Peraturan pemerintah RI. Nomor 4/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari 2014 pada pasal 1 ayat 10 bahwa Politeknik adalah Perguruan Tinggi (PT) yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu dan/atau teknologi. Poltekba merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain:

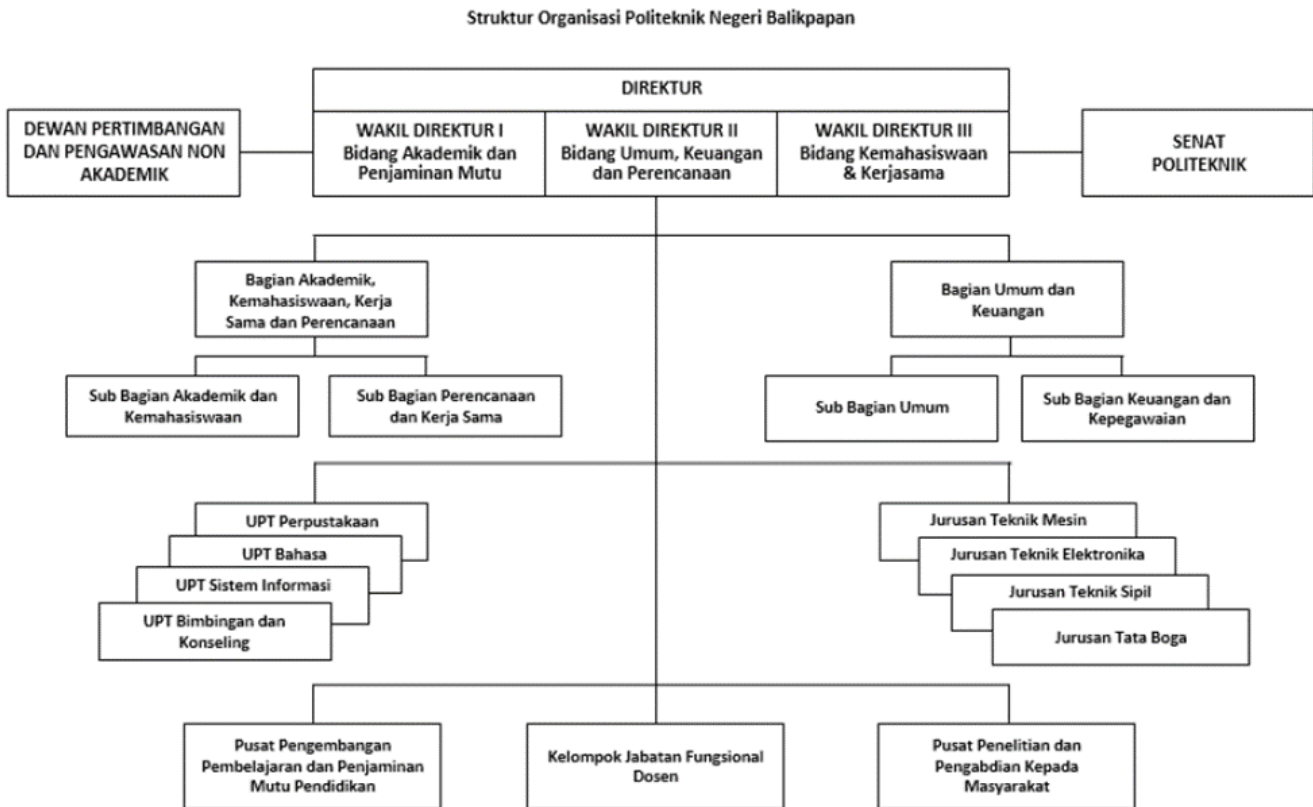
- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

1) Struktur Organisasi

Politeknik Negeri Balikpapan mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan, yaitu

- a. Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Negeri Balikpapan;
- b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- c. Satuan pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik; dan
- d. Dewan Pertimbangan sebagai organ menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Poltekba.

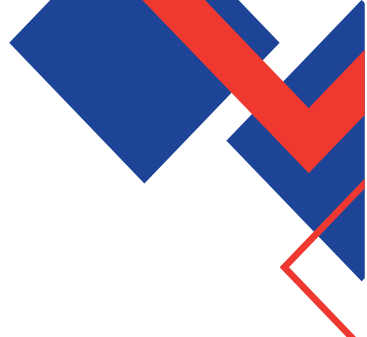
Untuk lebih jelasnya kami gambarkan bagan struktur organisasi Politeknik Negeri Balikpapan di bawah ini :



Gambar Struktur Organisasi Politeknik Negeri Balikpapan

Struktur Organisasi tersebut di atas terdiri dari organ sebagai berikut :

- a. Direktur;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Senat dan SP;
- d. 3 (tiga) Wakil Direktur
- e. Bagian Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan kerja sama, terdiri sub bagian :
 - 1) Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 2) Kerja sama dan Perencanaan.
- f. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri sub bagian :
 - 1) Umum;
 - 2) Keuangan dan Kepegawaian.

- 
- g. Jurusan, terdiri dari :
 - 1) Teknik Mesin;
 - 2) Teknik Sipil;
 - 3) Teknik Elektronika; dan
 - 4) Tata Boga
 - h. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - i. Pusat Pengembangan Pembelajaran & penjaminan Mutu.
 - j. Unit Penunjang Akademik terdiri dari:
 - 1) UPT. Perpustakaan;
 - 2) UPT. Bahasa;
 - 3) UPT. Sistem Informasi;
 - 4) UPT. Bimbingan dan Konseling.

2) Tugas dan Fungsi Organ Poltekba

Tata kelola perguruan tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Diimplementasikan sesuai dengan tata nilai, perkembangan, & kebutuhan Perguruan Tinggi, dan sesuai rencana strategis Kementerian. Sistem tata kelola perguruan tinggi diwujudkan antara lain dalam organisasi dan tata kerja perguruan tinggi sebagai sarana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Poltekba sebagai berikut :

a. Direktur

Merupakan organ Poiteknik Negeri Balikpapan yang menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi dalam hal ini Poltekba untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam menja-lankan fungsi, Direktur mempunyai tugas & wewenang:

- Menyusun statuta beserta perubahannya untuk dius- ulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan OTK Politeknik Negeri Balikpapan;
- Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
- Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana

- operasional) Poltekba;
- Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Poltekba;
 - Mengangkat/memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
 - Memberikan sanksi kepada dosen & tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - Menerima, membina, mengembangkan, memberhentikan mahasiswa;
 - Mengelola anggaran Poltekba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - Mengusulkan pengangkatan/pengukuhan profesor kepada Menteri;
 - Membina dan mengembangkan hubungan Poltekba dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma.

b. Dewan Pertimbangan

Adalah Organ Politeknik yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Politeknik. Dewan Pertimbangan merupakan organ Poltekba yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan non-akademik.

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas & kewenangan:

- Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-

- akademik;
- Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekba; dan
- Penggalangan dana untuk membantu pembangunan Poltekba.

c. Senat

Merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
- 2) Pengawasan terhadap:
 - Penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - Penerapan ketentuan akademik;
 - Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
- 4) Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan prodi;
- 5) Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- 6) Pemberian pertimbangan kepada Poltekba dalam pengusulan profesor; dan
- 7) Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin Poltekba.

d. Satuan Pengawasan (SP)

Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Perguruan Tinggi perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan (SP) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 19 Oktober 2011, dalam melaksanakan tugas SPI Poltekba menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun program pengawasan;
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program;
3. Melakukan pengawasan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara;
4. Melakukan pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5. Melakukan pendampingan & reviu laporan keuangan;
6. Memberi saran dan rekomendasi;
7. Menyusun laporan hasil pengawasan ke Direktur, dan
8. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan. Keanggotaan SP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 orang sesuai kebutuhan dan beban kerja terdiri atas :
 - Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Anggota SP Poltekba diangkat diberhentikan oleh Direktur yang memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, pengelolaan kepegawaian, atau organisasi dengan masa jabatan keanggotaan SP adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

e. Wakil Direktur

Wakil Direktur membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur, terdiri dari:

- 1) Wakil Direktur bidang Akademik dan Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut

Wadir I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu;

- 2) Wakil Direktur bidang Umum, Keuangan dan Perencanaan, selanjutnya disebut Wadir II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan.
- 3) Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, selanjutnya disebut Wadir III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

1. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja sama yang biasa disingkat BAAKPK merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik Negeri Balikpapan yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekba yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pembinaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I bidang Akademik dan sesuai dengan bidang tugasnya serta dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Bagian akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama di lingkungan Poltekba.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan,
- 2) Melaksanakan administrasi akademik;
- 3) Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan;
- 4) Melaksanakan registrasi & penyusunan data kemahasiswaan dan alumni;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan

6) Melaksanakan administrasi kerja sama.

Kepala BAAKPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memimpin, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan, dan administrasi kerja sama;
- 2) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan pembukaan jurusan dan program studi yang baru serta pengembangan jurusan dan program studi yang sedang berjalan;
- 3) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan proses belajar mengajar untuk semua jurusan/prodi;
- 4) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan persiapan, penyusunan, monitoring, dan pelaporan PDPT/EPSEBED ke Kemenristekdikti;
- 5) Mengkoordinir pengelolaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di tingkat pusat maupun setiap Jurusan/program studi;
- 6) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan & penetapan kalender akademik yang akan diberlakukan untuk setiap tahun ajaran baru;
- 7) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan & penetapan peraturan akademik yang akan diberlakukan untuk setiap tahun ajaran baru;
- 8) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru untuk setiap tahun ajaran baru;
- 9) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyiapan bahan, penyusunan dan pembahasan Rencana Kinerja Tahunan Institusi (Renop), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- 10) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan,

- pengajuan, pembahasan RKA-KL;
- 11) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan, pembahasan dan penyerahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
 - 12) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan penyusunan, pengajuan dan pelaporan program hbah di tingkat institusi;
 - 13) Mengkoordinir pengelolaan administrasi penyusunan laporan realisasi pencapaian program kegiatan serta keterserapan anggaran institusi selama satu tahun anggaran yang telah dilaksanakan;
 - 14) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan persiapan, inisiasi dan pengembangan kerja sama baik di bidang akademik maupun non akademik dengan pihak eksternal institusi;
 - 15) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan pengembangan konten pada sistem informasi administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerja sama;
 - 16) Mengkoordinir pengelolaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang terkait bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan dan kerja sama;
 - 17) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kegiatan pengajuan, pembinaan, pembubaran dan pelaporan organisasi kemahasiswaan;
 - 18) Mengkoordinir pengelolaan administrasi beasiswa atau bantuan pendidikan ke mahasiswa;
 - 19) Melakukan koordinasi lintas bagian terkait administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerja sama;
 - 20) Membuat dan menyampaikan pelaporan tepat pada waktunya terkait pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, & kerja sama;
 - 21) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan yang berada dibawahnya;
 - 22) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerja sama;
 - 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam

menjalankan tanggung jawabnya, Kepala BAAKPK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menentukan pola pengelolaan administrasi kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, dan kerja sama;
- 2) Mengambil kebijakan administratif operasional yang tidak bertentangan dengan garis kebijakan Direktur dan Wadir I;
- 3) Melakukan otorisasi seluruh usulan perencanaan dan pelaporan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, & kerja sama yang berasal dari unit kerja dibawahnya;
- 4) Melakukan otorisasi seluruh pengajuan pengadaan sumber daya, baik barang dan jasa terkait bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang diajukan oleh unit kerja di bawahnya;
- 5) Melakukan otorisasi seluruh pelaporan yang dibuat oleh unit kerja di bawahnya.


f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama.

- 1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, penyusunan data, pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan Mahasiswa serta alumni.

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan disingkat SBAK merupakan unsur pembantu pengelola administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAAKPK dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala BAAKPK sesuai dengan bidang tugasnya. SBAK dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan kegiatan Akademik & Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan.

Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan program kerja unit dibawahnya;

- 
- b) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan layanan administrasi akademik & kemahasiswaan baik di tingkat pusat maupun Jurusan/Program studi;
 - c) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengumpulan laporan kemajuan kegiatan akademik per triwulan dari setiap Jurusan/ Prodi;
 - d) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan akademik & kemahasiswaan;
 - e) Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan monitoring mata kuliah umum;
 - f) Mengelola pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan & pemanfaatan Aplikasi e-Learning;
 - g) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan konten dan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Akademik;
 - h) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan dari seluruh unit kerja terkait untuk pelaporan PDPT/EPSEB;
 - i) Membuat & menyampaikan pelaporan tepat pada waktunya terkait pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - j) Menyusun laporan perbandingan antara rencana dengan realisasi program dan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - k) Menghimpun & menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik & kemahasiswaan;
 - l) Menyusun draft peraturan akademik dan mahasiswa sesuai perundangan yang berlaku untuk direview oleh Ka BAAKPK dan disahkan oleh Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 3;
 - m) Menyerahkan bukti pelaksanaan realisasi program kegiatannya ke BAAKPK untuk direview;
 - n) Menyerahkan laporan perbandingan antara realisasi program dan kegiatan akademik & kemahasiswaan dengan DIPA beserta bukti pelaksanaan kegiatannya yang direview oleh BAAKPK ke kepala BAUK untuk dilaporkan ke Bendahara pengeluaran.
 - o) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan di

- bagian/unit yang berada dibawahnya;
- p) Mengelola kegiatan dan pelaksanaan perkuliahan umum.
 - q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- b) Melakukan analisa dan pengecekan validasi dan akurasi terhadap seluruh usulan;
- c) Melakukan verifikasi terhadap surat keterangan, kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai, ijasah, legalisir transkrip dan ijasah;
- d) Melakukan verifikasi terhadap administrasi kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- e) Memberikan penilaian terhadap kinerja.


2) bagian Perencanaan dan Kerjasama

Mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan, pengolahan, penyajian datadan informasi, penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi kegiatan kerjasama.

Sub Bagian Perencanaan dan Kerja sama merupakan unsur pembantu pengelola administrasi di bidang perencanaan dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAAKPK dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala BAAKPK sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Perencanaan dan Kerja sama dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan administrasi kegiatan perencanaan dan kerja sama di lingkungan Poltekba.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kerja sama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan perencanaan program kegiatan dan kerja sama di tingkat institusi;
- b) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan penyusunan rencana program kegiatan dan ang- garan serta pemenuhan dan data



pendukungnya dari setiap unit kerja ke dalam RKA-KL tingkat Politeknik Negeri Balikpapan.

- c) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring kemajuan program kegiatan dan pengumpulan laporan kemajuan program kegiatan per triwulan dan tahunan dari setiap unit kerja Poltekba;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan pengumpulan bahan dari setiap unit kerja Poltekba yang terkait untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- e) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan dan peraturan terkait administrasi perencanaan dan kerja sama;
- f) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan penyiapan bahan kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi kerja sama yang melibatkan setiap unit kerja Poltekba;
- g) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan konten dan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan & Anggaran (e-Planning & Budgeting);
- h) Mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan konten dan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Informasi Kerja dan Pengembangan Karir (JIKPK);
- i) Menghimpun & menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi perencanaan dan kerja sama;
- j) Membuat dan menyampaikan pelaporan tepat pada waktunya terkait pelaksanaan administrasi kegiatan di bidang perencanaan dan kerja sama;
- k) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan di bagian/unit dibawahnya;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Perencanaan dan Kerja sama memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan supervisi terhadap pekerjaan setiap unit yang berada dibawahnya;
- b) Melakukan analisa dan pengecekan validasi dan akurasi terhadap

- seluruh usulan;
- c) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan program kegiatan setiap unit kerja Poltekba, termasuk penjadwalan & anggarannya;
 - d) Melakukan verifikasi terhadap konten draft naskah kesepakatan (MoU) kerja sama.

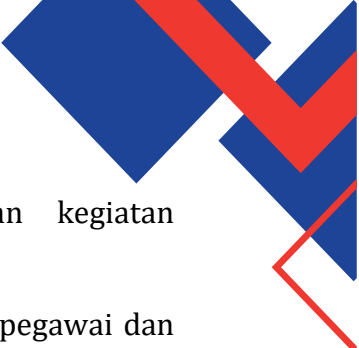
g. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatusahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, & hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wadir bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- 2) Melaksanakan urusan barang milik Negara;
- 3) Melaksanakan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- 6) Mengelola keuangan; dan
- 7) Mengelola Kepegawaiaan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memimpin, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan di BAUK;
- 2) Mengkoordinir pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran dana APBN, Hibah dan PNBP;
- 3) Mengkoordinir pengelolaan kegiatan pembuatan dan pelaporan laporan keuangan;
- 4) Mengkoordinir pengelolaan administrasi penerimaan sumber daya manusia dan pengajuan proses penerimaan pegawai negeri sipil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Mengkoordinir pengelolaan administrasi remunerasi, kepangkatan, mutasi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja pegawai;

- 
- 6) Mengkoordinir pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - 7) Mengkoordinir pengelolaan administrasi peningkatan motivasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - 8) Mengkoordinir pengelolaan administrasi perjalanan dinas, kesekretariatan, dan protokoler;
 - 9) Mengkoordinir pengelolaan administrasi BMN;
 - 10) Menetapkan alokasi penggunaan ruang;
 - 11) Menetapkan alokasi penempatan BMN;
 - 12) Mengkoordinir pembuatan laporan BMN;
 - 13) Mengkoordinir rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN);
 - 14) Melakukan koordinasi lintas bagian terkait bidang BAUK;
 - 15) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan di bagian/unit yang berada dibawahnya;
 - 16) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala BAUK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menentukan pola pengelolaan administrasi kegiatan & pelaksanaan di bidang administrasi umum dan keuangan;
- 2) Mengambil kebijakan administratif operasional yang tidak bertentangan dengan garis kebijakan Direktur dan wakil direktur di bidang umum dan keuangan;
- 3) Melakukan otorisasi seluruh usulan perencanaan dan pelaporan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang dilaporkan oleh unit bawahannya;
- 4) Melakukan otorisasi seluruh pengajuan sumberdaya terkait BAUK yang diajukan oleh unit bawahannya;
- 5) Melakukan otorisasi penerimaan pegawai, remunerasi pegawai, mutasi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai;
- 6) Melakukan otorisasi pengeluaran uang untuk kegiatan operasional,

pembiayaan, pendanaan, dan pengeluaran lainnya dengan besaran nilainya sesuai dengan keputusan manajemen;

7) Melakukan otorisasi mutasi uang institusi antar bank;

8) Melakukan otorisasi pengajuan penghapusan aset dan dokumen institusi.

Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 (dua) sub bagian yaitu :

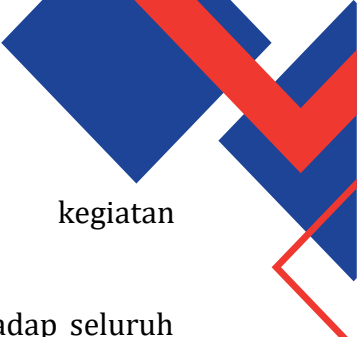
1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Sub Bagian Umum merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BAUK dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala BAUK sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum. Kepala Sub Bagian Umum memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan program kerja unit dibawahnya;
- b) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administrasi sarana, BMN dan kerumah tanggaan;
- c) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administrasi kesekretariatan (surat menyurat, undangan, no- tulen rapat, buku tamu, dll), hukum,& protokoler;
- d) Mengkoordinir kegiatan kehumasan, promosi dan sosialisasi;
- e) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan di bagian/unit yang berada dibawahnya;
- f) Menelaah peraturan perundang-undangan;
- g) Mengolah & mempergunakan laporan dari bawa- hannya sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Kasubag Umum memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 
- a) Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan administrasi umum, & administrasi BMN;
 - b) Melakukan analisa dan pengecekan validasi dan akurasi terhadap seluruh usulan;
 - c) Melakukan verifikasi terhadap surat keluar, dan dokumen-dokumen barang milik negara (aset);
 - d) Menerima dan memverifikasi laporan rekapitulasi pembiayaan disesuaikan dengan DIPA;
 - e) Memberikan penilaian kinerja di bawahnya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiaan

Tugas Subbag Keuangan dan Kepegawaiaan adalah melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiaan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang Keuangan dan Kepegawaiaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAUK.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiaan yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan kegiatan Keuangan dan Kepegawaiaan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaiaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan program kerja unit dibawahnya;
- b) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencairan DIPA
- c) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administrasi penerimaan dan pengeluaran APBN, dana hibah dan PNBP;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan pembuatan & pelaporan keuangan;
- e) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penerimaan pegawai dan pengajuan proses penerimaan pegawai negeri sipil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- f) Mengkoordinir kegiatan administrasi remunerasi, kepangkatan, mutasi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja pegawai;
- g) Mengkoordinir kegiatan administrasi dan pelaksanaan kegiatan

pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai;

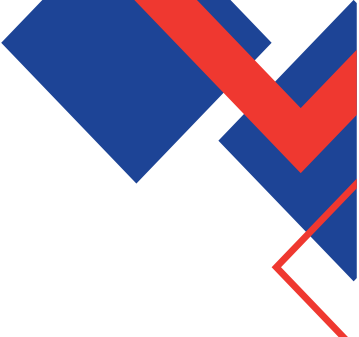
- h) Mengkoordinir kegiatan untuk peningkatan motivasi pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- i) Membuat rincian pekerjaan dan mengalokasikan beban pekerjaan di bagian/unit;
- j) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan keuangan;
- k) Mengolah dan mempergunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring & supervisi terhadap kegiatan keuangan dan Kepegawaian.
- b) Melakukan analisa dan pengecekan validasi dan akurasi terhadap seluruh usulan yang diajukan bawahannya;
- c) Melakukan verifikasi terhadap surat keterangan, rekomendasi, perhitungan gaji dan honor, pengajuan formasi PNS dan surat menyurat lainnya terkait keuangan dan Kepegawaian;
- d) Menyusun pola pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Memberikan informasi keikutsertaan pelatihan/ seminar bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- f) Menerima dan memverifikasi laporan rekapitulasi pembiayaan disesuaikan dengan DIPA; dan
- g) Memberikan penilaian kinerja unit kerja di bawahnya.

h. Jurusan dan Program studi

Jurusan yang ada pada Pasal 21 Permendiknas No. 41 tahun 2011 bahwa Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Jurusan di Poltekba setelah pengembangan terdiri atas:

- 
- 1) Jurusan Teknik Mesin;
 - 2) Jurusan Teknik Sipil;
 - 3) Jurusan Teknik Elektronika; dan
 - 4) Jurusan Tata Boga;

Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus dan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur melalui hasil pemilihan di Majelis Jurusan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua jurusan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengorganisasi dan menyusun rencana program kerja dan anggaran serta memantau/mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pengajaran & penelitian dilingkup bidang tertentu;
- 2) Menganalisis kebutuhan sumber daya dan pengembangannya;
- 3) Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di jurusan;
- 4) Memonitor kegiatan Program Studi;
- 5) Mengevaluasi kinerja Dosen dan kegiatan proses belajar mengajar dan membuat laporan diakhir semester;

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu bidang ilmu;
- 2) Menentukan pola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di program studi/jurusan di Politeknik negeri Balikpapan;
- 3) Menyusun pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Melakukan seleksi pengadaan tenaga pendidik yang akan ditempatkan di program studi di bawahnya;
- 5) Menyetujui dan melakukan otorisasi kurikulum yang akan digunakan dan alokasi beban kerja.

3) Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas meliputi enam area perubahan, yaitu:

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

2. PENATAAN TATALAKSANA

Target dari penguatan tata laksana adalah meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; serta meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target penguatan system manajemen SDM adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; serta meningkatnya disiplin SDM Aparatur.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Target penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; serta meningkatnya akuntabilitas aparatur.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target penguatan pengawasan adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang penyimpangan oleh aparatur;

serta memperoleh opini WTP.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target penguatan kualitas layanan public adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih baik, lebih murah); meningkatnya jumlah unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik; Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatnya profesionalisme aparatur.

Tabel Pembangunan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Balikpapan

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/ Belum Ada	Base Line 2021	2022	2023
I. MANAJEMEN PERUBAHAN				
1. Penyusunan Tim Kerja	Ada			
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	Ada			
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Belum ada			
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Ada			
5. Penyusunan Tim Kerja	Ada			
6. Rencana Pembangunan Zona Integritas	Belum ada			
7. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Ada			
II. PENATAAN TATALAKSANA				
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Ada			
2. Sistem	Ada			

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
3. Keterbukaan Informasi Publik	Ada			
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Ada			
2. Pola Mutasi Internal	Ada			
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Ada			
4. Penetapan Kinerja Individu	Ada			
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Ada			
6. Sistem Informasi Kepegawaian	Ada			
7. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Ada			
8. Pola Mutasi Internal	Ada			
9. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Ada			
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1. Keterlibatan Pimpinan	Ada			
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Belum ada			
V. PENGUATAN PENGAWASAN				
1. Pengendalian Gratifikasi	Ada			
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ada			
3. Pengaduan Masyarakat	Ada			
4. Whistle-Blowing System	Ada			

5. Penanganan Benturan Kepentingan	Ada			
6. Pengendalian Gratifikasi	Ada			
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1. Standar Pelayanan	Belum			
2. Budaya Pelayanan Prima	Belum			
3. Pengelolaan Pengaduan	Ada			
4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Ada			
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ada			

4) Pengelolaan SDM

Perencanaan pengelolaan SDM dilakukan dengan baik karena termasuk perencanaan strategis dan merupakan unsur yang menentukan dalam pengembangan Poltekba kedepannya. Penetapan standar SDM baik standar wajib dan standar turunan meliputi mutu SDM berupa profil dosen, kinerja penelitian dan PkM serta kecukupan tenaga kependidikan

Rencana dan Program Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu kepada Renstra Kemendikbudristek, Poltekba salah satu Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) untuk itu pengembangan SDM yang ada agar menciptakan tatakelola yang baik dan fleksibel sehingga mampu membuat keputusan tanpa dibebani oleh masalah birokrasi dan aturan peraturan dan perundang-undang yang berlaku sesuai tabel di bawah ini :

Tabel Target Program Peningkatan Kualitas SDM Poltekba

Sasaran Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas, dan kuantitas Tenaga Pendidik (Dosen) Poltekba	1. Jumlah Dosen mengikuti bea siswa S2 & S3 dalam negeri
	2. Jumlah Dosen mengikuti bea siswa S2 & S3 luar negeri
	3. Jumlah Dosen bersertifikasi
	4. Persentase Dosen menguasai bahasa asing
	5. Jumlah Dosen ditingkatkan kompetensinya

	6. Penambahan Dosen PNS
	7. Penambahan Jumlah Dosen non-PNS sesuai ketentuan
Meningkatnya kualitas, dan kuantitas tenaga kependidikan	1. Jumlah Tenaga Kependidikan mengikuti beasiswa S1 dan S2 dalam negeri
	2. Jumlah Tenaga Kependidikan mengikuti beasiswa S2 luar negeri
	3. Jumlah Tenaga Kependidikan ditingkatkan kompetensinya
	4. Penambahan Tenaga Kependidikan dari PNS
	5. Penambahan Tenaga kependidikan non-PNS.

A. Target Kinerja

Politeknik Negeri Balikpapan melakukan perubahan atau revisi Renstra 2020-2024, perubahan dilakukan karena adanya penyesuaian Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dimana perubahan ini mengacu pada target Standar Emas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi. Target Standar Emas adalah target untuk setiap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai tolok ukur keunggulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Balikpapan Nomor 1050/PL32/KL/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 memberikan perubahan Rencana Strategis dengan mengacu pada beberapa landasan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan keputusan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/2020 yaitu Keputusan yang menetapkan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, Berikut penjelasan tentang Keputusan tersebut :

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama :

Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipatuhi oleh PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020.

b. Pedoman bagi PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi:

Setiap PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kemendikbud diwajibkan untuk menggunakan IKU sebagai pedoman dalam beberapa hal, antara lain:

- Menetapkan rencana kerja

- Menyusun rencana kerja dan anggaran
 - Menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja.
 - Menyusun laporan kinerja
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- c. Terdapat 8 IKU dimana formula atau perhitungannya telah dijabarkan dalam peraturan tersebut sebagai berikut
1. Kesiapan kerja lulusan
 2. Mahasiswa diluar kampus
 3. Dosen diluar kampus
 4. Kualifikasi Dosen
 5. Penerapan Riset Dosen
 6. Kemitraan Program Studi
 7. Pembelajaran dalam kelas
 8. Akreditasi Internasional

Dengan demikian, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/2020 memberikan landasan yang jelas dan terperinci bagi PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Tabel Target Kinerja 2020-2021 (Kepmendikbud 754/P/2020)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2020	2021
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	80	55
IKU	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2	%	15	15	10

1.2	yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	20	20	15
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	40	30
IKU 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang	hasil penelitian per jumlah	0.15	0.15	0.10

	berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	dosen			
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	50	35
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	50	35
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.50	2.50	2.50
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan				

	Vokasi				
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat		BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai		93	93
					93.50

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 yaitu keputusan yang mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berikut penjelasan tentang Keputusan tersebut :

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama :

Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dipatuhi oleh PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

b. Pedoman bagi PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi :

Setiap PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemendikbud diharuskan untuk menggunakan IKU sebagai pedoman dalam beberapa hal, antara lain :

- Melakukan review terhadap capaian kinerja setiap PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk memastikan keandalan informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Penetapan 8 IKU dan fomula yang sama dengan Kepmendikbud 754/P/2020.

Dengan demikian, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 adalah instrumen penting dalam menetapkan standar kinerja dan akuntabilitas bagi Perguruan Tinggi Negeri.

Tabel target kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	57	57	60
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	15	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	30
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	35	35	50

IKU 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.12	0.12	100
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	40	40	100
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	40	40	40
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.50	2.50	2.50
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.50	93.50	94

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

210/M/2023 yaitu keputusan yang mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berikut penjelasan tentang Keputusan tersebut :

a. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus diterapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi

b. Terdapat 8 IKU dimana formula atau perhitungannya telah dijabarkan dalam peraturan tersebut sebagai berikut

1. Kesiapan kerja lulusan
2. Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi
3. Dosen diluar kampus
4. Kualifikasi dosen/pengajar
5. Penetapan karya dosen
6. Kemitraan program studi
7. Pembelajaran dalam kelas
8. Akreditasi internasional

Formula dan perhitungan berbeda dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/2020 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 dan dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

Tabel Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan	%	60	60	60

	studi; atau menjadi wiraswasta				
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	30	30	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	30	30
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	50	50	50
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	100	100	100
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	100	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	40	40
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional	%	2.50	2.50	2.50

	yang diakui pemerintah				
SK. 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	94	94	93
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	75

Berdasarkan pada ketiga tabel target kinerja IKU diatas bahwa perbedaan dari ketiga Kepmendikbud tersebut secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1. Perubahan urutan, prioritas dan nomor IKU sehingga lebih sistematis dan mudah untuk dipahami setiap pemangku kepentingan dan struktur organisasi di perguruan tinggi;
2. Perubahan-perubahan dari Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023 seperti yang dijelaskan diatas sangat baik dalam menyesuaikan dengan perkembangan target IKU yang yang berbasis luaran (output) menuju target yang berbasis dampak (outcome) sehingga capaian IKU menjadi lebih nyata dirasakan dampaknya pada segenap sivitas dan kinerja institusi secara keseluruhan.
3. Perubahan pada satuan capaian yang lebih riil dapat dicapai pada kondisi pendidikan tinggi vokasi dan lebih jelas sehingga perhitungan menjadi lebih valid dalam pencapaian target yang ditentukan.
4. IKU lebih realitis untuk pendidikan tinggi vokasi yang lebih fokus pada pendidikan professional dan kompetensi.
5. Adanya tambahan IKU untuk Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 pada revisi kedua renstra 2020-2024.

**Tabel Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)
Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target		
			2021	2022	2023	2024
Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran						
IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.		%	50	51	52	53
a. Berkualifikasi S3	IK-01 Persentase dosen berkualifikasi Doktor	%	5	6	7	8
b. Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja		%	35	35	35	35
c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-02 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri.	%	10	10	10	10
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.		%	35	40	40	40
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)		%	5	6	6	6
b. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)						

	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	%	10	10	10	10
	IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	Prodi	10	12	12	12
	IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	Prodi	10	12	12	12
Program Prioritas 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat							
IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			%	23	25	25	26
a. Berkegiatan tridarma di kampus lain di QS100 (berdasarkan ilmu)	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	Judul (Nominal)	5	6	6	6
b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri			%	5	6	6	6

c. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir			%	13	13	13	14
IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			Judul	0.10	0.12	0.13	0.13
a. Rekognisi Internasional							
b. Diterapkan oleh masyarakat							
	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	Judul (Nominal)	5	6	7	8
	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	Judul (Nominal)	16	17	18	19
	IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	Judul (Nominal)	16	17	18	19
	IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltekba dan diterbitkan oleh Poltekba dengan pembaca skala Nasional	Judul (Nominal)	16	17	18	19
Program Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri							
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	2.50	2.50	2.50	2.50
	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	Peringkat	5	5	6	8
	IK-12	Persentase Akreditas Program Studi Minimal B/Baik Sekali	%	50	60	60	70
	IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	Prodi	1	1	1	1

IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	BB	BB	BB	BB
	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Nilai	93.50	93.50	93.50	93.50
	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran	Nilai	93.50	93.50	93.50	93.50
Program Prioritas 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni							
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta			%	68	69	70	71
a. Mendapatkan pekerjaan	IK-16	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	48	49	50	50
b. Melanjutkan Studi	IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	%	10	10	10	10
c. Menjadi wiraswasta	IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	%	10	10	10	11
IKU 1.2 Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			%	0	15	15	15
a. Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus			%				
	IK-19	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	Prodi	0	5	6	8

	IK-20	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	Orang	50	60	70	80
b. Meraih prestasi minimal tingkat nasional			%				
	IK-21	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Orang	20	30	35	37
	IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	Judul				
Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri							
IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.			%	35	40	100	100
	IK-23	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	MoU	20	25	50	50
	IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	MoU	5	5	10	10
	IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	PKS	10	10	40	40

Tabel Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target			
				2022	2023	2024	
Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran							
IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri		%	15	15	30	30	
a. Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri;atau	IK-01	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU	%	10	10	15	15
b. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-02	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran.	%	5	5	15	15
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi		%	40	40	40	40	
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)		%	10	10	10	10	
b. Pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)		%					

	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	%	10	10	10	10
	IK-04	Persentase prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	%	10	10	10	10
	IK-05	Persentase Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	%	10	10	10	10
Program Prioritas 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat							
IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi			%	15	15	30	30
a. Berkegiatan tridharma	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	%	5	5	10	10
b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau			%	5	5	10	10
c. Membimbing mahasiswa berkegiatan diluar prodi			%	5	5	10	10

IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen			Judul	0.12	0.12	100	100
a. Rekognisi Internasional				0.10	0.10	100	100
b. Diterapkan oleh masyarakat							
	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	Judul (Nominal)	10	10	15	15
	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	Judul (Nominal)	20	20	25	30
	IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	Judul (Nominal)	20	20	25	30
	IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltekba dan diterbitkan oleh Poltekba dengan pembaca skala Nasional	Judul (Nominal)	20	20	30	35
Program Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri							
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah			%	0	2.50	2.50	2.50
	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	Peringkat	0	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
	IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	%	0	40	50	70
	IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	Prodi	0	1	1	1

IKU 4.1 Predikat SAKIP A			Predikat	A	BB	BB	A
	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A
IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L			Nilai	93.50	93.50	94	93
	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	Nilai	93.50	93.50	94	93
IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75			Nilai	-	-	-	75
	IK-16	Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	75
Program Prioritas 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni							
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.			%	57	57	60	60
a. Mendapatkan pekerjaan	IK-17	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan		37	37	38	38
b. Melanjutkan Studi	IK-18	Persentase jumlah lulusan yang studi lanjut dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah lulus.		10	10	10	10
c. Menjadi wiraswasta	IK-19	Persentase jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam rentang waktu 1 (satu) tahun		10	10	12	12

IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi			%	15	15	30	30
c. Menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi							
	IK-20	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	Prodi	5	5	7	9
	IK-21	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	Orang	50	50	80	90
d. Meraih prestasi pada kompetisi mulai tingkat provinsi sampai internasional							
	IK-22	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional	Orang	10	10	10	15
	IK-23	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	Judul	5	5	6	7
IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1			%	40	40	100	100
	IK-24	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	MoU	35	35	50	80
	IK-25	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	MoU	5	5	10	10
	IK-26	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	PKS	30	30	30	35

**Tabel Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung
Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	IK-16	diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	K-01	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
				K-02	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				K-03	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan
		IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	K-04	Pengembangan Pusat Karier Poltekba untuk Mahasiswa dan Alumni
				K-05	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Poltekba
		IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	K-06	Pengembangan keterampilan wirausaha
IKU 1.2	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IK-19	Jumlah prodi yang Melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	K-07	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka
				IK-20	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar
		K-09	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun		

		IK-21	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	K-10	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti
		IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	K-11	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	K-12	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
				K-13	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				K-14	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	IK-01	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	K-15	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		IK-02	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	K-16	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
IKU 2.3	Jumlah keluaran	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	K-17	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset

	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	K-18	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional
		IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	K-19	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA
		IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltekba dan diterbitkan oleh Poltekba dengan pembaca skala Nasional	K-20	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri Poltekba
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	IK-23	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	K-21	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun
				K-22	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang
		IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	K-23	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
		IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	K-24	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method)	K-25	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik

	kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi		dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based Project)		
				K-26	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
		IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	K-27	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4
		IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	K-28	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track
				K-29	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	K-30	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI
		IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	K-31	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan

		IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	K-32	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	K-33	Peningkatan kualitas tatakelola manajemen operasional Poltekba
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	K-34	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

**Tabel Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung
Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IK-16	Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	K-01	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
				K-02	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				K-03	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan
		IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	K-04	Pengembangan Pusat Karier Poltekba untuk Mahasiswa dan Alumni

				K-05	Keterlibatan alumni pada kegiatan di Poltekba
		IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	K-06	Pengembangan ketrampilan wirausaha
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	IK-19	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	K-07	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka
		IK-20	Jumlah Lulusan yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	K-08	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar
				K-09	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun
		IK-21	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional	K-10	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti
		IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	K-11	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	K-12	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
				K-13	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				K-14	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa

IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	IK-01	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU	K-15	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		IK-02	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran.	K-16	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	K-17	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset
		IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	K-18	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional
		IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	K-19	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA
		IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltekba dan diterbitkan oleh Poltekba dengan pembaca skala Nasional	K-20	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri Poltekba

IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IK-23	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	K-21	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun
				K-22	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang
		IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	K-23	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
		IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	K-24	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	K-25	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik
				K-26	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
		IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	K-27	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4
		IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum	K-28	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track

			sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja		
				K-29	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	K-30	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI
		IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	K-31	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
		IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	K-32	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional
IKU 4.1	Predikat SAKIP	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	K-33	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional Poltekba
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	K-34	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	IK-16	Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	K-35	Peningkatan kualitas tata kelola Zona Integritas

B. Kerangka Pendanaan

pada tahun 2020-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri dari rupiah murni serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana – dana ini dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang merupakan acuan utama dalam pelaksanaan anggaran .

Pendanaan rupiah murni mencakup alokasi langsung anggaran pendapatan dan belanja negara yang disediakan oleh pemerintah pusat. Sementara PNBP mencakup pendapatan yang di peroleh Politeknik Negeri Balikpapan dari berbagai sumber non pajak seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan kegiatan lainnya yang mendukung operasional institusi. Kedua sumber pendanaan ini diintegrasikan secara strategis untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

Dengan adanya DIPA, Politeknik Negeri Balikpapan memiliki panduan yang jelas dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat.

Jenis pendapatan Politeknik Negeri Balikpapan dikelompokkan dalam dua sumber dengan rincian masing-masing sumber sebagai berikut:

- a. Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan anggaran yang bersumber dari :
 1. Alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS).
 2. Alokasi anggaran untuk operasional kantor.
 3. Alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
 4. Sumber lain termasuk pengadaan sarana prasarana kampus (SBSN).
- b. Pendapatan Non APBN, merupakan anggaran yang bersumber dari :
 1. Pendapatan biaya pendidikan.
 2. Pendapatan dari optimalisasi asset.
 3. Pendapatan dari jasa perbankan.
 4. Pendapatan dari kerja sama industri.
 5. Pendapatan dari hibah/penugasan.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat yang akan ditetapkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perencanaan dan memberikan

dampak positif yang signifikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga akan menjadi fokus utama, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memantau dan menilai kinerja Politeknik Negeri Balikpapan secara objektif.

Dengan demikian, kombinasi pendanaan dari rupiah murni dan PNBP, yang dikelola melalui DIPA, akan menjadi landasan kuat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Politeknik Negeri Balikpapan selama periode 2020-2024, dan membantu mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Tabel Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan Poltekba Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendapatan	Baseline		Proyeksi		
		2020	2021	2022	2023	2024
I	APBN	26.778.805.000	32.515.512.000	33.806.769.000	36.913.163.000	39.576.489.000
a.	Rupiah Murni	15.256.864.000	18.565.537.000	18.493.079.000	19.765.281.000	21.882.783.000
b.	BOPTN	6.146.544.000	6.107.932.000	6.302.432.000	6.195.625.000	6.678.341.000
c.	PNBP - Biaya Pendidikan	5.375.397.000	7.842.043.000	9.011.258.000	10.952.257.000	11.015.365.000
II	Non APBN	1.498.078.650	1.613.688.550	1.711.049.300	1.786.737.850	1.886.436.450
a.	Kerjasama Tridharma PT	614.654.400	610.793.200	630.243.200	619.562.500	667.834.100
b.	Hibah APBD	307.327.200	305.396.600	315.121.600	309.781.250	333.917.000
c.	Penggunaan Aset BMN	307.327.200	305.396.600	315.121.600	309.781.250	400.510.000
d.	Lain-Lain	268.769.850	392.102.150	450.562.900	547.612.850	550.768.200
TOTAL PENDAPATAN (I+II)		28.276.883.650	34.129.200.550	35.517.818.300	38.699.900.850	41.462.925.450

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan 2020-2023

No	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	12.740.756.800	13.402.491.400	13.387.999.800	13.642.440.200
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	8.193.847.200	9.186.449.100	9.164.711.700	9.546.372.300

3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	9.662.777.200	10.655.379.100	10.633.641.700	11.015.302.300
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	7.788.624.800	8.450.359.400	6.066.212.800	8.690.308.200
	Jumlah	38.386.006.000	41.694.679.000	39.252.566.000	42.894.423.000

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	13.174.303.091
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	9.471.362.091
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	10.313.096.636
4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	10.160.485.636
	Jumlah	43.119.247.454

A. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman dalam pelaksanaan renstra institusi ini dilaksanakan berdasarkan penjabaran program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja utama berdasarkan surat keputusan Dirjen Vokasi Kemendibud Ristek Dikti Nomor 62/D/M/2023. Renstra Poltekba disusun agar program pengembangannya sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Balikpapan. Renstra ini juga menjaga keselarasan program-program poltekba agar senantiasa relevan sesuai dengan tugas pokok tri dharma perguruan tinggi. Renstra akan menentukan arah program kegiatan dalam membangun kapabilitas institusi melalui peningkatan sumber daya yang keberlanjutan serta penguatan tata kelola yang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan. Pelaksanaan program penguatan tata kelola diharapkan akan meningkatkan kapabilitas institusi dalam menjalankan mandat dan fungsinya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

B. Kaidah Pelaksanaan

1. Penegasan Visi dan Misi

Setiap langkah yang diambil harus selaras dengan visi dan misi Politeknik Negeri Balikpapan, yang menekankan pada pengembangan lulusan berkualitas tinggi yang siap menghadapi tuntutan industri.

2. Kemitraan Strategis

Membangun kemitraan yang kuat dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan relevansi kurikulum dan peningkatan peluang kerja bagi lulusan.

3. Pengembangan Program yang Relevan

Menyusun dan mengembangkan program akademik yang responsif terhadap perkembangan teknologi, tren pasar kerja, dan kebutuhan industri.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk penerapan teknologi dalam pembelajaran.

5. Budaya Inovasi dan Penelitian

Mendorong budaya inovasi yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan (pranata laboratorium pendidikan) dan mahasiswa, serta mendukung kegiatan penelitian senantiasa menjaga kekinian ilmunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan industri.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menyediakan program pengembangan profesional bagi staf akademik dan administratif serta memfasilitasi pengembangan kepribadian dan keterampilan tambahan bagi mahasiswa.

7. Manajemen yang Efisien dan Transparan

Menetapkan standar manajemen yang tinggi dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan sumber daya lainnya, dengan fokus pada efisiensi dan transparansi.

8. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi dan kinerja institusi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi tersebut.

9. Globalisasi melalui Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dicanangkan adalah dalam bentuk penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa serta menjalankan proses belajar mengajar bersama dengan perguruan tinggi dan industri.

10. Monitoring dan Pelaporan

Menetapkan sistem monitoring yang efektif untuk melacak kemajuan implementasi strategi dan menyusun laporan berkala yang memuat capaian serta tantangan yang dihadapi.

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksa na/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	-	-	-	7.942.272	8.273.139	-	-	-	WD III
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	-	-	-	4.798.484	5.129.351	-	-	-	WD I & WD III
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	-	-	-	1.612.638	1.943.505	-	-	-	WD I & WD III

IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	-	-	-	3.864.599	4.195.466	-	-	-	WD I & WD II
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0.10	0.10	-	-	-	2.716.609	3.047.476	-	-	-	WD I
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	-	-	-	1.711.504	2.042.371	-	-	-	WD III
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	-	-	-	6.339.546	6.670.413	-	-	-	WD I
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.50	2.50	-	-	-	1.611.726	1.942.593	-	-	-	WD I
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	-	-	-	3.895.341	4.226.208	-	-	-	WD II
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.50	-	-	-	3.893.283	4.224.150	-	-	-	WD II

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	-	55	57	70	-		8.273.139	8.265.893	8.393.114	-	WD III
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	-	10	15	20	-		5.129.351	5.122.105	5.249.326	-	WD I & WD III
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	-	15	15	35	-		1.943.505	1.936.259	2.063.480	-	WD I & WD III
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	-	30	35	52	-		4.195.466	4.188.220	4.315.441	-	WD I & WD II
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	Hasil Peneliti an per	-	0.10	0.12	0.20	-		3.047.476	3.040.230	3.167.451	-	WD I

IKU 2.3	masyarakat per jumlah dosen.	jumlah dosen											
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	-	35	40	75	-		2.042.371	2.035.125	2.162.346	-	WD III
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	-	35	40	45	-		6.670.413	6.663.167	6.790.388	-	WD I
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D4 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	-	2.50	2.50	2.50	-		1.942.593	1.935.347	2.062.568	-	WD I
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	BB	BB	BB	-		4.226.208	1.849.307	4.346.183	-	WD II
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	-	93.50	93.50	94	-		4.224.150	4.216.904	4.344.125	-	WD II

C. Matriks Kinerja dan Pendanaan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi										8.393.114	8.159.045	
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	-	-	-	60	60	-	-	-	5.249.326	5.015.257	WD III
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	-	-	-	30	30	-	-	-			WD I & WD III
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi										2.063.480	2.456.607	
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	-	-	-	30	30	-	-	-	4.315.441	4.081.372	WD I & WD III
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	-	-	-	50	50	-	-	-	3.167.451	2.933.382	WD I & WD II
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	-	-	-	100	100	-	-	-	8.393.114	8.159.045	WD I

SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	-	-	-	100	100	-	-	-	2.162.346	1.928.277	WD III
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	-	-	-	40	40	-	-	-	6.790.388	6.556.319	WD I
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	-	-	-	2.50	2.50	-	-	-	2.062.568	1.828.499	WD I
SK. 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri												
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	-	-	-	BB	A	-	-	-	4.346.183	4.112.114	WD II
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	-	-	-	94	93	-	-	-	4.344.125	4.110.056	WD II
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	-	75	-	-	-		1.938.314	WD II

2. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	PIC	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Pengembangan kelambagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Penetapan Perubahan OTK Poltekba oleh Menteri	Wakil Direktur II	Seluruh Unit Kerja	Tahun 2024
2	Peningkatan mutu layanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Keputusan Direktur tentang jenis dan tarif layanan yang berlaku di Poltekba	Wakil Direktur II	Seluruh Unit Kerja	Tahun 2023
3	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang inovatif, bermutu dan berdaya guna	Keputusan Direktur tentang panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	P3M	Jurusan	Tahun 2021

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Balikpapan mengacu pada Kepmendikbud Nomor 210/M/2023

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, Formula	Satuan	Sumber Data	PIC/Pengampu
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi					
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D3/D4/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	<p>Definisi Operasional : Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi Program Studi S1 dan D3/D4/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. Kriteria Pekerjaan : Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2. organisasi nirlaba; 3. institusi/organisasi multilateral; 4. lembaga pemerintah; atau 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <p>b. Kriteria Kelanjutan Studi : Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S3 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria Kewiraswastaan : Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau 2. pekerja lepas (freelancer). 	Jumlah lulusan	Aplikasi Tracer Study	1. Wakil Direktur I 2. UPT CDC

	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n= responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan).</p>			
<p>[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.</p>	<p>Definisi Operasional : Mahasiswa aktif Program Studi S1 dan D3/D4/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.</p> <p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah pa-ling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi mu1tilateral, institusi pemerintah, ataupun</p>	Jumlah Mahasiswa	Aplikasi PDDIKTI dan SIDAKIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 2. Wakil Direktur 3 3. Jurusan 4. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

		<p>perusahaan rintisan (startup company).</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun didalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun Bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penangalan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait; dan/ atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait.</p> <p>a. Kriteria prestasi</p> <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional;</p> <p>b) tingkat nasional; atau</p> <p>c) tingkat provinsi.</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p>			
--	--	--	--	--	--

		3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.			
		<p>Formula :</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p> a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain). </p>			

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, Formula	Satuan	Sumber Data	PIC/Pengampu
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi					
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	<p>Definisi Operasional : Dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. <p>b. Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, 	Jumlah dosen	Aplikasi Sister dan PDDIKTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I 2. Wakil Direktur III 3. Bagian Akademik 4. Bagian Kepegawaian

		<p>penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.</p> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi</p> <p>Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <p>1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full tdmel, atau paruh waktu (part time) di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri founder)atau pasangan pendtri (co- founder) di:</p> <p>a) Perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (startup company)</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>teknologi; atau</p> <p>e) organisasi niriaba nasional dan internasional.</p> <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.</p> <p>d) Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <p>1. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;</p> <p>2. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional;</p> <p>b) tingkat nasional; atau</p> <p>c) tingkat provinsi.</p> <p>3. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industry Dan masyarakat.</p> <p>4. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>			
<p>[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<p>Definisi Operasional : Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP serta memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	Jumlah dosen	Aplikasi Sister dan PDDIKTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I 2. Wakil Direktur II 3. Bagian Akademik 4. Bagian Kepegawaian.

	<p>a) Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari Lembaga berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b) Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi. Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di <ol style="list-style-type: none"> a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) Institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co- founder) di : <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 			
--	---	--	--	--

		<p>3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <p>a) Berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) Menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) Menjadi pendiri (founder) atan pasangan pendiri (co- founder) sanggar.</p>			
		<p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> <p>z = jumlah dosen dengan NUP</p>			
	<p>[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Definisi Operasional :</p> <p>Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri / pemerintah per jumlah dosen.</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <p>1) Artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter)dalam buku akademik;</p> <p>2) Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;</p>	<p>Jumlah keluaran dosen</p>	<p>Aplikasi SISTER</p>	<p>1.Wakil Direktur I</p> <p>2.P3M</p> <p>3.Bagian Kepegawaian</p>

	<p>3) Studi kasus; dan/atau 4) Laporan penelitian untuk mitra.</p> <p>a. Karya terapan, terdiri atas: 1) Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) Pengembaagan invensi dengan mitra.</p> <p>b. Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) Karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</p>			
	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>			

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, Formula	Satuan	Sumber Data	PIC/Pengampu
Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran					
	[IKU 3.1] Jumlah Kerjasama perprogram studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	<p>Definisi Operasional : Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.</p> <p>a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) Mengisi kegiatan pembelajaral dengan dosen tamu praktisi; 6) Menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling)bagi dosen maupun instruktur; 7) Menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8) Menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9) Menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10) Melakukan kemitraan penelitian. <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan multinasional; 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) Perusahaan teknologi global; 4) Perusahaan rintisan (startup compang) teknologi; 5) Organisasi nirlaba kelas dunia; 6) Institusi/organisasi multilateral; 	Jumlah kerjasama	Aplikasi SIKERMA	1. Wakil Direktur 3 2. Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama

	<p>7) Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);</p> <p>8) Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;</p> <p>9) Instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;</p> <p>10) Rumah sakit;</p> <p>11) UMKM;</p> <p>12) Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau</p> <p>13) Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</p>			
	<p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>			
<p>[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-</p>	<p>Definisi Operasional : Mata Kuliah pada Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team- based project).</p>	Jumlah mata kuliah	Aplikasi PDDIKTI	<p>1. Wakil Direktur I 2. Bagian Akademik 3. P4MP</p>

<p>based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan kasus (case method): <ol style="list-style-type: none"> a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project): <ol style="list-style-type: none"> a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. e) Kelompok diberikan project dari dunia usaha industry. 			
---	---	--	--	--

		b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).			
		<p>Formula :</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>			
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	<p>Definisi Operasional : Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p>	Jumlah Program Studi	Aplikasi PDDIKTI	1. Wakil Direktur 1 2. P4MP

		<p>Formula :</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>			
--	--	---	--	--	--

No	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, Formula	Satuan	Sumber Data	PIC/Pengampu								
Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola Perguruan Tinggi Negeri													
	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	<p>Definisi Operasional : Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB atas rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Interprestasi</th> <th>Keterangan Interprestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 -100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif,</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Interprestasi	Keterangan Interprestasi	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif,	Nilai/Predikat	Laporan hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud ristek	1. Wakil Direktur 2 2. SPI 3. Bagian Perencanaan
Kategori	Nilai	Interprestasi	Keterangan Interprestasi										
AA	>90 -100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif,										

				dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.			
		A	> 80 – 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.		
		BB	> 70 – 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi		

				informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.			
	B	> 60 – 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.			
	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.			
	C	> 30 – 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga			

				masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.																					
	D	>0 – 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.																					
	<p>Metode Perhitungan : Metode penghitungan nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Sakip</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Nilai</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Komponen Sakip	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30%	2	Pengukuran Kinerja	30%	3	Pelaporan Kinerja	15%	4	Evaluasi Kinerja	25%	Total Nilai		100%			
No.	Komponen Sakip	Bobot																							
1	Perencanaan Kinerja	30%																							
2	Pengukuran Kinerja	30%																							
3	Pelaporan Kinerja	15%																							
4	Evaluasi Kinerja	25%																							
Total Nilai		100%																							
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p>			Nilai	SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 2 2. Bagian Keuangan 2. Bagian Perencanaan 																		

		<p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p>			
		<p>Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p> <p><i>Nilai Kinerja Anggaran = [50% x Nilai EKA + [50% x Nilai IKPA]</i></p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>			

[IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

Definisi Operasional :

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai
Nilai Total	75	
Nilai Minimal Pengungkit	40	
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 areaperubahan/ pengungkit.
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	
a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30
b. Nilai sub-komponen	2,5	

Persen

Aplikasi siAzik

1. Wakil Direktur 2
2. Bagian Umum
3. Bagian Kepegawaian
4. Bagian Perencanaan

“Kinerja Lebih Baik” minimal		
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30

Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.

Penilaian	Bobot
1. Manajemen Perubahan	8%
2. Penataan Tata Laksana	7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5. Penguatan Pengawasan	15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing- masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.

Metode Penghitungan:

Formula:

Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)

Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih

		Baik) + Komponen Pelayanan Prima. Tipe Perhitungan : Nonkumulatif.			
--	--	---	--	--	--